



**PKNU BERGABUNG
DENGAN GERINDRA**
Prabowo: Ini
Kekuatan Dahsyat!

GEMA UTAMA >>04



**HUT KE-5 PARTAI
GERINDRA**
Songsong
Perubahan
Indonesia 2014

INDONESIA >>08



**KEZIA ELVINA
WABISER**
Politik Bukan
Profesi

FIGUR >>13

6



G E M A

TERBIT 16 HALAMAN/EDISI 23/TAHUN III/MARET 2013

INDONESIA RAYA

www.partaigerindra.or.id

GELORA

KORUPSI MUSUH DEMOKRASI

DEMOKRASI adalah jalan yang sudah kita pilih. Kita saksikan perkembangan pesat laju demokrasi politik sejak 1998. Kebebasan berserikat berkumpul, menyatakan pendapat dan sikap tanpa rasa takut. Di sisi lain, kemajuan ekonomi berjalan lebih lambat. Kemiskinan masih besar, lapangan kerja sulit dan kesenjangan ekonomi tak bisa dipungkiri.

Perkembangan demokrasi politik diikuti naiknya praktik korupsi. Hampir semua partai politik tersandung korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan yang paling klasik. Puncaknya, dua pimpinan tertinggi partai dijadikan tersangka korupsi.

Kenapa pertumbuhan demokrasi selalu diikuti pertumbuhan korupsi? Pertama, corak demokrasi kita sekarang ini liberal. Kebebasan tanpa batas menimbulkan anarki, termasuk mencari keuntungan pribadi. Kedua, tak ada rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sisi lain kekuasaan. Ketika kekuasaan dipegang, tanggung jawab adalah kontrolnya. Tanpa tanggung jawab, kekuasaan menjadi koruptif.

Korupsi kini merupakan ancaman bagi demokrasi. Ada tiga modus. Pertama, partai mencari uang dengan kekuasaan yang dimiliki sebagai partai pemerintah atau penguasa. Ada rente pengalokasian anggaran proyek, bansos dan berbagai usaha lain mencuri dari APBN. Kedua, kurangnya kontrol partai di luar pemerintah atau oposisi. Dalam praktiknya oposisi tak terjadi ketika ada peluang untuk melakukan persekongkolan korupsi oleh oknum politisi. Ketiga, politisasi birokrasi sebagai usaha melancarkan jalannya korupsi. Ada usaha "mempartakan" birokrasi. Ini tampak jelas di sejumlah kementerian yang dipimpin politisi partai politik.

Terjadinya korupsi dalam impor sapi atau kasus Hambalang, bukti nyata penyalahgunaan kekuasaan. Tak ada rasa tanggung jawab apalagi berpikir soal rakyat. Kasus-kasus ini ibarat pucuk gunung es. Jika kita lihat secara utuh, korupsi sudah mendarah daging dalam kehidupan politik. Umpama kanker sudah stadium empat. Korupsi tak kenal latar belakang agama, ideologi, politik, etnis atau golongan. Ketika pemimpin atau penguasa tak punya rasa tanggung jawab lagi, korupsi sulit dibasmi.

Memberantas korupsi dalam demokrasi tentu tak mudah. Godaan begitu tinggi, peluang berlaku curang sangat besar. Sistem demokrasi liberal yang merajalela ini harus dievaluasi. Pemimpin-pemimpin politik yang bertanggung jawab harus tampil ke gelanggang.

Kita harus memupuk kembali pemimpin yang berkarakter. Karakter tumbuh dari perilaku sehari-hari, tindakan sehari-hari. Dalam kehidupan biasa pun kita memilih dan mengambil keputusan bagi diri sendiri. Pikiran yang baik melahirkan tindakan yang baik, lalu karakter yang baik dan mungkin nasib yang juga baik.

Memang tak ada yang sempurna. Setiap orang tentu ada kekuatan dan kelemahan. Namun. Pemimpin politik seharusnya menjadi nakhoda yang bijak. Ia memberi inspirasi, membimbing, mengarahkan. Ia mampu menggerakkan kader untuk berjuang bersama, gotong royong, sesuai kapasitas dan kapabilitas. Pemimpin yang bertanggung jawab tahu batas kekuasaan dan bagaimana menggunakan kekuasaan itu. Dengan tanggung jawab, barulah demokrasi akan hidup dan korupsi mati pelan-pelan. ◀ **FADLI ZON**



PATUK...!

Anas Urbaningrum mundur dari Ketua Umum DPP dan kader Partai Demokrat setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Hambalang oleh KPK.

Ayo Anas, bongkar semua.....

Presiden SBY akan menaikkan gaji Bupati dan Wali Kota
Apa maksud...?



FOTO MUSTAFA KEMAL

PRABOWO SUBIANTO

BUKAN KEKUASAAN, TAPI AMANAH RAKYAT

KETUA Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto berucap, "Demi Allah, di hadapan-Mu, di ulang tahun ini, saya katakan, saya tidak berambisi untuk menduduki jabatan hanya untuk jabatan itu".

"Sumpah" dengan mengucap "Demi Allah" terlontar saat Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik pada syukuran ulang tahun ke-5 Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jl. Harsono R.M, Ragunan, Jakarta Selatan, pada Rabu siang, 6 Februari 2013. Syukuran ulang tahun ke-5 Partai Gerindra ini dihadiri Dewan Pembina, Dewan Penasihat, jajaran DPP Partai Gerindra, sayap-sayap partai, beberapa ketua DPD, dan kader Gerindra yang memenuhi ruangan tenda besar.

"Sekarang usia saya sudah 62 tahun. Dulunya, kawan-kawan bersama saya di pertempuran. Dulunya saya tidak punya apa-apa. Tapi, saya siap mati untuk republik ini. Kami bukan di belakang meja. Kita dulu tentara di lapangan, memimpin di depan, menghadapi tembakan musuh. Kita siap mati untuk republik ini. Tidak mengharap apa-apa," kata Prabowo, purnawirawan jenderal bintang tiga itu.

"Sekarang pun saya seperti itu. Bukan jabatan dan kekuasaan yang saya kejar, tapi amanah rakyat. Saya merasakan rakyat membutuhkan kepemimpinan yang benar. Dan kita harus berjuang untuk memberi kepemimpinan itu," lanjut Prabowo.

Mantan Pangkostrad itu menegaskan, bila mendapat mandat dari rakyat, tidak akan bekerja sendiri karena tidak mungkin membuat perubahan di Indonesia seorang diri. Dia akan mengajak seluruh kekuatan di Partai Gerindra untuk melakukan perubahan. "Perubahan adalah pekerjaan besar kita semua. Tidak ada artinya Prabowo tanpa dukungan rakyat, tanpa Gerindra, tanpa massa, tanpa kader-kader yang militan. Tanpa mereka kita tidak mungkin berbuat apa-apa," katanya yang disambut riuh hadirin.

Suara Prabowo kemudian meninggi. "Tapi Prabowo bersama semua kader, bersama seluruh kekuatan, kita mampu. Kita mampu. Kita mampu. Kita mampu. Kita akan melakukan perubahan," suara Prabowo menggetarkan ruangan dan menggetarkan hati sanubari kader Partai Gerindra yang hadir. Semua menyambut riuh. "Prabowo Presiden...Prabowo Presiden...Prabowo Presiden..."

Kepada para kader Gerindra, Prabowo berpesan agar jangan bergantung pada satu orang Prabowo saja. "Kalau Prabowo jatuh. Biarkan dia. Cari Prabowo-Prabowo lain. Jangan hanya satu orang. Karena itu saya sedang mencari pengganti-pengganti saya. Kalau ada apa-apa dengan saya, perjuangan Gerindra tidak boleh surut, tidak boleh menyerah," katanya.

Prabowo mengaku sedang mencari dan menyiapkan kader-kader terbaik Partai Gerindra, yaitu kader yang setia pada Pancasila dan UUD 1945, serta setia kepada rakyat Indonesia. "Mereka harus pribadi-pribadi yang baik. Bukan *pancilok-pancilok*, bukan munafikun-munafikun. Bukan senyum di depan, tetapi di belakang berkhiyanat," ujarnya. Prabowo tidak rela bila orang-orang jahat berkuasa di republik ini.

Dalam pidato politik yang berlangsung hampir satu jam itu, Prabowo kembali mengingatkan bahwa Partai Gerindra adalah alat perjuangan untuk melakukan perubahan besar di Indonesia. "Kita ingin menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, membangun sistem politik dan ekonomi yang bersih, yang membela rakyat. Kita ingin mencegah bangsa ini menjadi bangsa korup. Kita tidak ingin republik kita menjadi republik maling. Kita tidak ingin republik kita hancur karena uang rakyat dirampok oleh kelompok pemimpin-pemimpinnya," katanya. ◀ **BUDI SUCAHYO**

Caleg dari Sayap Partai

Salam Indonesia Raya, Saya Fitriadi, Ketua OKK DPC Gardu Prabowo Aceh Barat. Pada hari Senin, 18 Februari 2013, kami Bacaleg yang direkomendasikan Gardu Prabowo Aceh Barat mendatangi Partai Gerindra Aceh Barat untuk mendaftar. Singkat cerita, kami ditolak oleh sekretaris dan dikatakan pendaftaran sudah ditutup dan tidak ada lagi formulir. Kami tidak dilayani layaknya tamu datang ke kantor Gerindra, tidak disuruh masuk dan diteras ruko kami diberi penjelasan, tapi itu tidak masalah. Edaran DPN Gardu Prabowo per dapil dapat mengajukan satu Bacaleg tidak ditanggapi, bahkan mereka bilang tidak ada dasar per dapil satu caleg dari Gardu Prabowo, apa dasarnya. Kami tidak menerimanya, setahu kami pendaftaran dibuka hingga 28 Februari 2013.

Besoknya kami datang lagi dan hari ini juga kami sampaikan ke ketua partai. Jawabannya tetap sama, tidak bisa lagi. Kader Partai saja banyak tak tertampung, apalagi kalian. Adapun Bacaleg yang direkomendasikan Gardu Prabowo Aceh Barat untuk DPRD II (DPRK), yaitu dapil 1. Safrijal; dapil 2. Yusri D; dapil 3. Teuku Nahar Sani; dan dapil 4. Fitriadi.

Kami mohon dibantu sampaikan persoalan ini ke pimpinan. Kami mau antara Partai Gerindra dengan Gardu Prabowo dapat sejalan menuju sasaran hingga selesai.

Demikian harapan kami, dan mohon nasib kami dipertimbangkan.

FITRIADI LANTA
Meulaboh, Aceh Barat

Terima kasih Pak, sesuai dengan arahan Ketua Dewan Pembina Bapak Prabowo Subianto untuk menjaring caleg di luar kader partai karena beliau ingin caleg yang berkualitas dan partai ini terbuka untuk rakyat. Jadi tidak benar kalau ada ketetapan untuk sayap-sayap partai dapat jatah 1 orang/ dapil. Tetapi kalau berkualitas wajib didukung partai. Partai ini ingin menjadikan caleg yang berkualitas demi

kepentingan rakyat yang lebih besar.

Info Caleg

Salam Indonesia Raya, Mohon infonya soal formulir pencalegan dari Partai Gerindra Pusat, apa sudah turun sampai ke tingkat DPC. Saya berdomisili di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sampai saat ini belum menerima formulir pencalegan.

Terima kasih.

JEFFRY GAUTHAMA
Blora, Jawa Tengah

Terima kasih Pak Jeffri. Pendaftaran caleg dari Partai Gerindra secara langsung dan tidak boleh diwakilkan pada masing-masing tingkatan, seperti: caleg DPR RI harus mendaftar di DPP Partai Gerindra, caleg DPR Provinsi mendaftar di kantor DPD Partai Gerindra setempat, dan begitu juga dengan caleg DPR Kab/Kota mendaftar ke DPC Partai Gerindra di dapilnya. Mengenai formulir pendaftaran caleg, langsung ditangani oleh masing-masing tingkatan struktur partai.

Ingin Ikut Kegiatan Partai

Salam merah putih!

Nama saya Prasetya Bagus Danier, domisili di kota Tuban. Izin bertanya, saya baru pulang dari Jerman untuk studi. Pada waktu di Jerman saya mendaftar untuk menjadi anggota Partai Gerindra. *Alhamdulillah*, KTA sudah ada. Namun saya mau tanya, kenapa tidak mendapat atribut? Juga apabila ingin mengikuti kegiatan Partai Gerindra saya harus bagaimana?

Kebetulan posisi saya sekarang sedang di Jakarta. Karena saya sangat mengagumi Bapak Prabowo dan ingin menjadi bagian dari Partai Gerindra. Demikian pertanyaan saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.

Salam hormat

PRASETYA BAGUS DANIER
Jakarta

Terima kasih, atribut partai tidak dikirimkan tapi bisa dibeli di toko-toko yang



ILUSTRASI SUSTHANTO

menjual atribut partai atau bisa juga ke koperasi di DPP Partai Gerindra. Untuk bisa ikut kegiatan Partai Gerindra, silahkan datang ke DPC dan DPD setempat atau ke DPP Partai Gerindra.

Biografi Prabowo

Salam Indonesia Raya! Saya Ahmad Afandi dari Bantul Jogjakarta. Saat ini saya sedang berusaha mengumpulkan biografi tokoh-tokoh besar dari dalam negeri. Barangkali buku-buku itulah yang akan menjadi pedoman hidup bagi anak-anak saya. Jika berkenan, dapatkah saya mendapatkan biografi Bapak Prabowo. Sangat berbahagia lagi jika Bapak Prabowo berkenan menandatangani buku tersebut.

Demikian permohonan saya. Maaf jika mengganggu dan berharap besar. Prinsip saya, semua harus dicoba. Masalah hasil, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa

AHMAD AFANDI
Bantul, Jogjakarta

Biografi Pak Prabowo, setahu kami belum ada. Tapi buku tentang ide, gagasan dan pemikiran Beliau cukup

banyak beredar di toko-toko buku. Terima kasih.

Wawancara untuk Penelitian

Saya Cindy Ramadhania, mahasiswa Fikom Unpad. Saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi. Penelitian saya tentang film *Triumph des Willens*. Yang saya teliti adalah tentang propaganda Adolf Hitler di film itu.

Saya membutuhkan tambahan referensi tentang propaganda politik di media, dan saya merasa bagian dari kampanye Partai Gerindra dapat membantu saya. Jika diizinkan saya ingin melakukan wawancara untuk tambahan referensi di penelitian saya. Semoga pihak Partai Gerindra dapat membantu saya.

Saya berharap atas kerjasama dan kesanggupan untuk diwawancara.

Terima kasih atas perhatiannya.
Salam hangat

CINDY RAMADHANIA
Bandung, Jawa Barat

Terima kasih, silahkan kirim surat resmi ke DPP Partai Gerindra, Jl. Harsono

RM. No.54 Ragunan, Jakarta.

Pergantian Pengurus

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang terhormat pengurus DPP Partai Gerindra. Saya Moh. Nurhadi, ST., Ketua PAC Partai Gerindra Karangploso menanyakan, apakah benar ada pergantian pengurus di DPC Kabupaten Malang. Kalau memang benar ada pergantian, apakah DPP tidak melanggar produk hukum yang telah DPP buat sendiri.

Waktu kita sudah sangat dekat dengan pemilu legislatif dan pilpres. Saya sangat memohon DPP memerhatikan perasaan dan pengorbanan kami demi Partai Gerindra. Mohon dijawab dengan cepat dan tegas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MOH. NURHADI, ST
Malang, Jawa Timur

Terimakasih Pak Nurhadi. Untuk saat ini kami belum menerima pemberitahuan terhadap pergantian pengurus di DPC Partai Gerindra,

Kab. Malang.

Saran Rekrutmen Caleg

Ini hanya sekedar saran dari kami masyarakat Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Coba dipikirkan matang-matang, ada seseorang yang akan menggunakan pintu Gerindra untuk menjadi calon anggota legislatif Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara berinisial HT. Orangnyanya tidak mencerminkan seorang pemimpin. Setiap malam mabuk-mabukan, berkelahi.

HT dulunya orang partai lain yang dikeluarkan secara tidak hormat, karena masalah miras dan pencurian. Pantaskah dia menjadi caleg yang diusung oleh partai Gerindra? Yang ada hanya akan menurunkan elektabilitas Partai Gerindra. Tolong saran kami dipertimbangkan matang-matang sebelum dia merusak nama besar Partai Gerindra.

SYARDHAN SAMPARA
Konawe, Sulawesi Tenggara

Terima kasih atas informasinya.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA

Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12160
Telp: 62-21-789 2377, 780 1396
Fax : 62-21-781 9712
Email: info@partaigerindra.or.id

**GEMA
INDONESIA RAYA**

Pembina: Prabowo Subianto **Pemimpin Umum:** Hashim Djojohadikusumo **Pemimpin Redaksi:** Fadli Zon **Wakil Pemimpin Redaksi:** M. Asrian Mirza **Dewan Redaksi:** Suhardi, Widjono Hardjanto, Ahmad Muzani, Martin Hutabarat, Amran Nasution, Kobalen, **Redaktur Pelaksana:** Syahril Chilli **Redaktur:** Budi Sucahyo, Helvi Moraza, Subuh Prabowo, Yong W Pati (Artistik), Mustafa Kemal (foto) **Staf Redaksi:** Agustaman, Iman Firdaus, M. Budiono, Wahyu Mahardhika **Sekretaris Redaksi:** Wendra Wizar **Riset:** Hasby M Zamri, **Website:** Fadlun Ramadhany, Andi Nur Hamdi **Sirkulasi dan Distribusi:** Juanda Nurhakim **Umum:** Agung Budiarto, Ari Sobari **Penerbit:** Badan Komunikasi Partai Gerindra **Alamat Redaksi dan Usaha:** Jl. Danau Jempang B II No 13, Bendungan Hilir, Jakarta 10210 Telp.: 62-21 5785 3480 Fax.: 62-21 5785 2552

redaksi_gir@partaigerindra.or.id atau redaksi_gir@yahoo.com

Gerindra

@Gerindra

Redaksi menerima artikel, berupa berita ataupun kolom serta foto dari anggota, pengurus pusat dan daerah serta simpatisan Partai Gerindra. Khusus untuk kalangan simpatisan diharap menyertakan identitas diri. Tulisan bisa dikirim via email ataupun pos.



Karena Ical dan SBY Teman Baik

OLEH AMRAN NASUTION

(Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra)

BANYAK pengamat berpendapat popularitas partai amat tergantung tokohnya. Itu terlihat jelas betapa PDI Perjuangan amat tergantung Megawati Soekarnoputri, Gerindra pada Prabowo Subianto, atau Partai Demokrat pada Presiden SBY dan belakangan juga pada Ketua Umumnya Anas Urbaningrum.

Maka ahli ilmu politik Profesor Salim Said menjuluki partai-partai yang amat tergantung tokoh itu sebagai *fans club* atau kumpulan para penggemar. Para penggemar Megawati berkumpul di PDI Perjuangan, penggemar SBY di Partai Demokrat dan Prabowo di Gerindra.

Itu disebabkan institusionalisasi atau pelembagaan partai-partai belum sempurna karena kebanyakan partai yang ada baru berumur setahun jagung. Mereka dilahirkan setelah reformasi 1998. Partai Gerindra, sekadar contoh, belum berusia 6 tahun. Padahal partai ini disebut-sebut merupakan salah satu calon pemenang pemilu 2014 atau setidaknya masuk jajaran 3 besar.

tanahnya dan itu menyebabkan Golkar terus-menerus berada di pucuk kekuasaan. Para kadernya terlatih. Lebih dari itu sepanjang Orde Baru partai ini menjadi tempat berkumpul para kader terbaik bangsa ini.

Setelah sempat limbung di pengujung kekuasaan Orde Baru, terutama setelah Pak Harto turun dari kekuasaan, kini Partai Golkar sudah betul-betul pulih dan disebut-sebut akan memenangkan pemilu 2014.

Tapi masalah Golkar sekarang justru pada ketua umumnya, Aburizal Bakrie alias Ical. Ketika terpilih dua tahun lalu di forum Musyawarah Nasional (Munas) dengan mengalahkan pengusaha Surya Paloh, Ical dianggap salah satu konglomerat Indonesia yang sukses. Ia memasuki forum Munas dengan janji kampanye akan membangun kantor Golkar yang megah.

Ternyata sampai sekarang kantor baru itu tak pernah terdengar kabar beritanya. Cerita yang ramai beredar – terutama oleh pers internasional – justru soal utang luar negeri



ILUSTRASI YONG W PATI

batu bara (bisnis utama Ical) di pasar internasional.

Salah satu perusahaannya, *Bumi Resources*, dikabarkan memiliki utang 3,9 milyar dolar atau hampir Rp 40 triliun. Belum perusahaan lainnya. Oleh karenanya jangan heran kalau belakangan Ical terlihat sibuk melego berbagai perusahaan dan aset-asetnya, antara lain, kepada pengusaha Harry Tanu Sudibyo.

Di dalam negeri, Ical dan perusahaannya setidaknya memiliki utang Rp 800 miliar kepada penduduk Sidoarjo, Jawa Timur. Utang itu disebutkan sendiri oleh Presiden SBY di depan sidang kabinet, 14 Februari lalu. “Kalau sudah janji mestinya ditepati. Kalau tidak urusannya dunia akhirat,” kata Presiden mengingatkan Ical untuk melunasi ganti rugi kepada masyarakat Sidoarjo.

Utang itu berasal dari musibah yang di-

sebabkan perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie, PT Lapindo Brantas. Ketika perusahaan itu melakukan eksplorasi gas dengan mengebor perut bumi di Sidoarjo, terjadi insiden semburan lumpur panas dari lubang pengeboran yang sampai sekarang tak bisa dihentikan. Semburan itu menjadi malapetaka bagi penduduk sekitarnya. Rumah, sawah, kebun, dan semua tanaman mereka dihanyutkan lumpur panas.

Jelas bencana itu berasal dari pengeboran PT Lapindo, sehingga perusahaan milik Ical itulah yang mestinya bertanggung jawab. Tapi sesuai keputusan Presiden SBY, anehnya ganti rugi atas malapetaka itu selain ditanggung PT Lapindo, juga pemerintah melalui APBN. Untuk tahun 2012, misalnya, pemerintah harus mengeluarkan dana Rp 2 triliun, antara lain, guna memberi ganti rugi ke penduduk.

Sementara itu, ganti rugi dari PT Lapindo milik Ical justru tersendat-sendat. Sampai sekarang ditaksir PT Lapindo belum membayar sekitar Rp 800 miliar kepada penduduk Sidoarjo yang rumah atau sawahnya ditenggelamkan lumpur. Tampaknya semua ini bisa terjadi karena Ical dan Presiden SBY berteman baik.

Tapi dalam keadaan prihatin seperti ini Ical tampak tetap bersemangat mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu 2014. Tampaknya dia berpikir: walau telah gagal memimpin perusahaannya yang terjebak utang, dia bisa sukses memimpin Indonesia. Anda percaya? ◀

“ PT Lapindo milik pengusaha Aburizal Bakrie belum bayar ganti rugi untuk penduduk di Sidoarjo Rp 800 milyar. Kenapa bisa? ”

Maka satu-satunya partai yang berusia panjang dan terinstitusionalisasikan dengan baik adalah Partai Golkar. Selama 32 tahun zaman Orde Baru partai ini dijadikan Presiden Soeharto pendukung legitimasi pemerin-

yang jumlahnya sangat besar, kini ditanggung perusahaan-perusahaan milik Ketua Umum Golkar itu. Para pengamat mengatakan kecerobohan menyebabkan perusahaan Ical berantakan, terutama setelah anjloknya harga

DPR Untuk Siapa?



ILUSTRASI YONG W PATI

KONSTALASI politik di Senayan seringkali memukau perhatian masyarakat. Bukan karena keberhasilan DPR dalam menjalankan amanat konstituen melainkan karena kegagalan dalam mengaplikasikan tugas mulia yang telah dijanjikan sebelum menjadi wakil rakyat. Lebih parah lagi, di saat masyarakat berharap banyak pada wakilnya guna menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah, ternyata para anggota legislatif itu sibuk menghadapi kasus hukum. Kasus hukum tersebut bervariasi, mulai dari perilaku amoral sampai dengan tersandung kasus korupsi. Maka wajar jika muncul pertanyaan sederhana dari masyarakat kecil, DPR untuk siapa?

Ironi memang. Wakil rakyat yang berfungsi sebagai pembawa aspirasi konstituen ternyata tidak bisa diandalkan. Padahal secara filosofi, institusi parlemen merupakan personifikasi rakyat yang menunjukkan adanya pengaku-

an terhadap supremasi kedaulatan tertinggi di tangan rakyat sebagaimana dijamin secara konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945. Sederet fakta yang dilakukan oknum DPR itu menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan pribadi ternyata lebih menarik daripada pengabdian terhadap konstituen dan negara.

Fenomena tersebut tentu akan berimplikasi berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi wakil rakyat. Hal ini akan membahayakan keberlangsungan ketatanegaraan di negeri ini, sebab akan meningkatkan ketidaktertarikan masyarakat dalam memberikan hak suara pada pemilu mendatang. Secara faktual, hal ini telah terbukti dari besarnya angka golput pada pemilu 2009 yang mencapai 29,1%. Sedangkan pada Pilpres 2009 jumlah golput mencapai 28,3%.

Dalam perspektif hukum tata negara,

OLEH JIMMY Z USFUNAN, SH., MH

Kabid Orpol TIDAR Bali, Sekretaris Badan Komunikasi DPD Partai Gerindra Bali dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana, Bali



terdapat teori mandat yang dipopulerkan oleh J.J Rousseu terkait perwakilan. Dari mandat imperatif, mandat bebas dan mandat representatif, patut dimengerti bahwa seorang wakil rakyat harus bertindak sesuai keinginan rakyat yang telah memberikan mandat kepadanya. Artinya, teori ini sejalan dengan esensi demokrasi yang menekankan pada persoalan supremasi di tangan rakyat. Sehingga dapat dimaknai bahwa segala penyelenggaraan pemerintahan harus bertujuan demi kepentingan rakyat.

Ke depan

Fenomena sosial tersebut harus dijadikan pembelajaran oleh DPR, jika ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap “buruknya kinerja DPR”. Karenanya, keseriusan dan ketulusan seluruh anggota dewan sangat diharapkan dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Jika DPR dapat mengembalikan citranya dengan lebih memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan ketulusan tanpa “*over acting*”, maka masyarakat akan bergerak mem-

berikan penghargaan terkait kinerja DPR yang telah memperjuangkan hak-hak rakyat dan aspirasi konstituen itu.

Di samping itu upaya solutif lainnya guna mengubah paradigma buruk DPR di mata rakyat, diperlukan juga peranan partai politik dalam menyeleksi kader sehingga menghasilkan kader-kader yang berintelektual, bermoral, serta bersungguh-sungguh dengan ketulusan untuk membangun bangsa dan negara ini. Sehingga aktivitas transaksional yang seringkali dimainkan dalam memilih kader-kader partai harus dihentikan. Mengingat, sorotan yang selalu ditujukan terhadap parlemen adalah minimnya produk legislasi yang dihasilkan.

Semoga Partai Gerindra dapat menghasilkan kader-kader potensial, bermoral, berintelektual, berintegritas pada pemilu 2014, sehingga mampu menjalankan sepenuhnya amanat rakyat serta membahagiakan rakyat dengan kinerja nyata. Dengan demikian Partai Gerindra diharapkan mampu menepis pertanyaan masyarakat yang merisaukan, yakni “DPR untuk siapa?” ◀

PKNU BERGABUNG DENGAN GERINDRA

Prabowo: Ini Kekuatan Dahsyat!

FOTO ANDI NUR HAMDI

Partai Gerindra dan PKNU sepakat membentuk sayap partai bernama Gerakan Rakyat Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Gerak Aswaja). Dengan sayap partai ini, PKNU siap memenangkan Partai Gerindra dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang mengusung Prabowo Subianto sebagai Presiden 2014.

OLEH BUDI SUCAHYO

KETUA Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memerhatikan dengan seksama penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman yang sedang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra Prof. Dr. Suhardi dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), KH. Choirul Anam. Di belakangnya ikut menyaksikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Sekretaris Jenderal PKNU Tohadi. Berada di samping Ketua Umum PKNU, Ke-

tua Dewan Syuro PKNU KH Abdul Azim Suhaimi.

Dengan penandatanganan MoU itu, PKNU akhirnya secara resmi bergabung dengan Partai Gerindra. Acara yang berlangsung di Aula Kantor DPP Partai Gerindra, Jl. Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, pada Minggu 17 Februari 2013 itu sempat molor beberapa jam. Semestinya acara itu dimulai pukul 13.00 WIB, namun diundur hingga pukul 14.30.

Usai penandatanganan, Prabowo Subianto diapit Suhardi dan Choirul Anam mengangkat tangan bersama-sama secara bergandengan. Senyum pun mengembang di wajah pimpinan kedua partai itu. Ahmad Muzani dan KH Abdul Azim Suhaimi juga ikut mengangkat tangan bersama. Ini menunjukkan ketulusan kedua partai untuk bersama-sama seiring sejalan.

Penandatanganan MoU kedua partai itu melahirkan kesepakatan untuk membentuk sayap Partai Gerindra yang dinamakan Gerakan Rakyat Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Gerak Aswaja) untuk memenangkan Partai Gerindra dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden, serta mengantarkan Prabowo Subianto menjadi presiden 2014.

"Hari ini Gerakan Indonesia Raya mendapat kekuatan baru, yang melebur ke dalam barisan, untuk bersama-sama melakukan perubahan demi perbaikan rakyat Indonesia," kata Prabowo Subianto di depan kader Partai Gerindra dan

PKNU. Dari PKNU hadir jajaran pengurus pusat, pengurus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat. Mereka memenuhi setengah dari jumlah kursi di Aula Kantor DPP Partai Gerindra. Dari Partai Gerindra tampak hadir Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Wakil Ketua Umum Fadli Zon, dan sayap-sayap partai.

Menurut Prabowo, PKNU adalah partai yang mewakili Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kelompok ini adalah kelompok Islam yang utama di Indonesia. "Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah kekuatan Islam *mainstream*, moderat, nasionalis, berkebangsaan. Islam yang membawa berkah, *rahmatan lil alamin*," katanya.

"Kekuatan Islam itulah yang kita terima hari ini, Kekuatan yang menurut saya adalah kekuatan yang membanggakan. Kekuatan yang dahsyat, luar biasa," kata Prabowo lagi.

Konstituen PKNU, terutama dari kalangan nahdliyin, sebagian besar adalah petani, buruh, nelayan, pedagang kecil. "Merekalah yang harus kita perjuangkan. Mereka berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik," ujar Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus itu berharap, semua kader PKNU merapat ke Gerindra. Prabowo siap membuka peluang dan memberi prioritas serta memfasilitasi kader-kader PKNU yang telah merapat ke Gerindra. "Kita ingatkan kepada semua kader Partai Gerindra bahwa

kita harus menang. Demi rakyat Indonesia, kita harus menang," tegasnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa Partai Gerindra tidak boleh menjadi yayasan sosial dan menampung orang-orang yang hanya ingin hidup enak. "Karena itu, Partai Gerindra dengan sadar dan seksama serta jernih memilih strategi membuka barisan untuk menampung semua kekuatan pro rakyat. Gerindra bukan mencari kursi. Gerindra mencari kemenangan untuk memimpin perubahan di Indonesia," paparnya.

Kepada kader Partai Gerindra, mantan Pangkostrad itu mengingatkan agar bersinergi dengan kader baru Gerindra dari PKNU. Bersama PKNU, Gerindra akan semakin kuat untuk mewujudkan cita-cita bersama. Semuanya diimbau untuk terus memimpin gerakan perubahan dan perbaikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Selamat bergabung PKNU, kita usung perubahan Indonesia," ucapnya.

Gerak Aswaja

Sementara itu Ketua Umum PKNU Choirul Anam mengatakan, PKNU sudah sepakat dengan Gerindra untuk membentuk sebuah sayap partai. Pada awalnya, nama sayap partai itu bernama Gerakan Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Tetapi setelah dirembuk oleh sebuah tim, nama itu diubah menjadi Gerak Aswaja, yaitu Gerakan Rakyat Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Choirul Anam—yang sering disapal Cak Anam—menambahkan, PKNU sudah sering berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Komunikasi intensif itu akhirnya mencapai kata sepakat dan berujung dengan penandatanganan MoU (nota kesepahaman).

Menurut Cak Anam, sayap Partai Gerindra ini akan bergerak dari Pusat sampai ke bawah dan memanfaatkan jaringan PKNU. Anam juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat PKNU akan mengadakan Rapimnas untuk menyusun rencana ke depan. "Ini tidak akan mengganggu organisasi Partai Gerindra dan sayap-sayap Gerindra yang lain," ujarnya.

Kesepakatan PKNU dengan Partai Gerindra juga merupakan kesepakatan secara aspiratif. Artinya, aspirasi politik PKNU akan disalurkan ke Partai Gerindra dan memenangkan Partai Gerindra dalam pemilu legislatif (Pileg) maupun pemilu presiden (Pilpres). "Kita sudah sepakat dengan Partai Gerindra, kita akan terus bergerak memenangkan Partai Gerindra dalam Pileg dan Pilpres 2014, khususnya memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden 2014," jelasnya.

Cak Anam mengungkapkan alasan lain bergabung dengan Partai Gerindra adalah karena Partai Gerindra memperjuangkan rakyat kecil. Konstituen PKNU, khususnya warga NU, umumnya rakyat miskin, kelompok tani, nelayan, buruh, dan TKI. "Ini harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh," ujarnya. Setelah melihat partai-partai di Senayan, Cak Anam tidak percaya aspirasi rakyat kecil itu bisa diperjuangkan.

"Saya sudah konsultasi dengan Dewan Syuro dan kiai-kiai sepuh. Kami sepakat bahwa dengan Gerindra bisa memperjuangkan rakyat miskin supaya taraf hidupnya lebih baik dan sejahtera. Dan kita melihat, iklan-iklan Pak Prabowo, Partai Gerindra memperjuangkan nasib para petani, nelayan, buruh," papar Cak Anam.

Apalagi, lanjut Anam, Prabowo juga membuka pintu untuk calon legislatif dan calon kepala daerah dari PKNU. Kader-kader PKNU membutuhkan saluran untuk menjadi anggota DPR atau bupati. "Waktu saya ketemu Prabowo, dia langsung minta caleg-calegnya nanti didaftar. Saya belum tanya tapi sudah disambut begitu. Akhirnya saya dengan niat yang tulus dan sudah dikonsultasikan dengan seluruh jajaran PKNU, termasuk pinisepuh, maka tidak ada jalan lain, dan ini adalah pilihan terbaik, maka kita bergabung dengan Partai Gerindra," pungkasnya. ◀

Sejumlah Partai Lain Bakal Menyusul

Setelah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), ada sejumlah partai akan menyusul bergabung dengan partai berlambang kepala burung Garuda itu.

OLEH BUDI SUCAHYO

PENANDATANGANAN nota kesepahaman (MoU) antara Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Gerindra diwujudkan secara konkret dengan mengakomodir kader PKNU untuk menjadi calon legislatif (caleg) dari Partai Gerindra. "Saya sudah memberi petunjuk kepada Ketua Umum dan DPP Partai Gerindra untuk memberikan kesempatan pada kader terbaik PKNU. Kader PKNU yang unggul, kita berikan prioritas," ujar Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, usai penandatanganan MoU Partai Gerindra dan PKNU di Kantor DPP

Partai Gerindra, Jl. Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu 17 Februari 2013.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa kesempatan untuk kader yang ingin maju sebagai caleg, baik dari PKNU maupun Partai Gerindra, tidak akan berbasis pada kuota. "Tidak ada kuota atau jumlah. Yang kita bicarakan adalah berbasis kualitas," katanya.

Bergabungnya PKNU, menurut Prabowo, menjadi tambahan kekuatan bagi Partai Gerindra. Prabowo juga mengungkapkan, Partai Gerindra membuka diri kepada semua partai politik yang tidak lolos

menjadi peserta pemilu 2014 untuk bergabung seperti halnya PKNU.

Namun, mantan Danjen Kopassus itu belum berkenan menyebutkan partai mana saja yang sudah menjalin komunikasi intensif. "Pada saatnya nanti, partai yang menyalurkan aspirasi politiknya ke Partai Gerindra akan kita umumkan. Tidak etis untuk menyebutkan sekarang ini," katanya.

Mengenai bergabungnya PKNU dengan Gerindra, Prabowo mengatakan, sudah berbicara intensif dengan Ketua Umum PKNU Choirul Anam. "Dengan Cak Anam sudah lama dimatangkan

bentuk kerjasamanya seperti apa. Telah didiskusikan mendalam, dan pemantapan, baru kita umumkan sekarang," kata mantan Pangkostrad itu.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, juga berpendapat sama bahwa bergabungnya PKNU dengan Partai Gerindra dapat menambah kekuatan di kalangan nahdliyyin. "Kita tahu kader PKNU berasal dari NU. Kami berharap ada tambahan kekuatan pada pemilu," kata Fadli.

Selain itu, bergabungnya PKNU juga dapat memperkuat basis massa Gerindra di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Ini akan menambah energi yang membuat Gerindra semakin kuat dan kokoh di wilayah Jawa bagian tengah dan timur," ujarnya.

Merapatnya PKNU ke Partai Gerindra menimbulkan pertanyaan terkait dengan perbedaan ideologi kedua partai tersebut. Namun Fadli Zon berpendapat bahwa Gerindra dan PKNU memiliki banyak kesamaan. "Gerindra dan PKNU tidak banyak perbedaan karena kita sama-sama kebangsaan. Selain kebangsaan, Gerindra juga religius. Platform Gerindra ada dalam AD/ART dan manifesto partai. Kita kebangsaan dan juga religius," katanya.

Kedua partai, lanjut pria berkacamata itu, juga memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin memperbaiki kondisi Indonesia. Atas dasar kesamaan visi itulah kedua partai kemudian bekerjasama. "Kita sama-sama ingin memperbaiki negara," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa kesepakatan antara PKNU dan Partai Gerindra bukanlah peleburan dua partai. "Penggabungan ini bukanlah penggabungan partai politik. Apa yang digabung? Yang bergabung adalah berubahnya PKNU menjadi organisasi sayap Gerak Aswaja (Gerakan Rakyat Ahlul Sunnah Wal Jamaah)," kata Muzani usai penandatanganan MoU.

Organisasi sayap ini, jelas Muzani, merupakan wujud baru dari PKNU menjadi sebuah ormas setelah tidak lagi menjadi peserta pemilu 2014. "Maka untuk memanfaatkan infrastruktur yang dimiliki PKNU, ormas ini kemudian menyalurkan aspirasi politiknya ke Partai Gerindra, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2014," jelasnya.

Muzani menambahkan, melalui Gerak Aswaja, kader-kader PKNU yang ingin melanjutkan perjuangan politiknya bisa disalurkan melalui Gerindra. "Kami memberikan ruang bahkan memprioritaskan kepada anggota DPRD yang sekarang masih duduk di dewan, karena mereka selama ini sudah teruji dan terpilih. Kira-kira seperti itu," ujarnya.

Meski kader PKNU dapat menyalurkan karir politiknya di Gerindra, tapi partai berlambang kepala burung Garuda itu tetap memprioritaskan kader PKNU yang berkualitas. "Tadi Pak Prabowo sudah mengatakan tidak ada bagi-bagi kuota kepada PKNU. Tetapi untuk mereka yang kualitasnya bagus, tentu kita akan memberikan prioritas itu," pungkasnya. ◀



FOTO-FOTO ANDI NUR HAMDI

Ketua Umum PKNU KH Choirul Anam "Saya Sudah Bertemu Prabowo Subianto"

BEBERAPA waktu lalu sempat diberitakan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) merapat ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketua Umum PKNU KH Choirul Anam bertemu dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Surabaya, pada 9 Februari 2013. Mengapa PKNU akhirnya memilih bergabung dengan Partai Gerindra? Dengan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) secara resmi PKNU bergabung dengan Partai Gerindra. Berikut ini penjelasan Ketua Umum PKNU Choirul Anam:

Kenapa akhirnya PKNU merapat ke Gerindra, bukan ke PPP?

Banyak pertanyaan kepada saya, kemarin diberitakan PKNU merapat ke PPP. Jang-jangan PKNU mau main dua kaki. Saya jawab bahwa sebelum saya bertemu kawan-kawan dari PPP, yaitu Suryadharma Ali dan rombongan, saya sudah bertemu dengan Pra-

bowo Subianto di kediamannya, di Sentul, Jawa Barat. Ketika bertemu Suryadharma Ali, saya bersama kawan-kawan di Jawa Timur ditawarkan bergabung dengan PPP, tapi secara alami. Ini dikatakan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali.

Tanpa pikir panjang, saya jawab oke. Setuju. Kenapa? Karena alami itu artinya tergantung alam atau tergantung cuaca. Kalau cuacanya mendung, kita bergabungnya mendung. Kalau cuacanya panas, ya bergabungnya panas. Atas tawaran PPP itu, saya jawab, ya saja.

Saya meminta kepada Sekjen untuk merumuskan "secara alami" itu. Tetapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Karena sulit untuk merumuskan "secara alami" itu. Akhirnya tidak bisa. Kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa. Kita cari yang tidak alami. Yang tidak alami itu, seperti aturan main di UU, adalah Gerakan Indonesia Raya.

Berapa "kekuatan" PKNU?

Pada Pemilu 2009, menurut catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), PKNU mendapat 1,47% suara. Tapi, menurut catatan kami, jumlah suara itu 2,5%. Ini mungkin karena perbedaan hitung-hitungan. Basis PKNU di Jawa Timur. Salah satu daerah kemenangan adalah di Kabupaten Bondowoso. Di Bondowoso, Ketua DPRD dari PKNU. Kita siap untuk membalik tangan di sana. PKNU yang menang nomor satu akan diberikan kepada Gerindra.

PKNU dan Partai Gerindra memiliki ideologi yang berbeda. Bagaimana tanggapan Bapak?

Jangan diartikan bahwa ideologi religius itu dalam arti sempit. Indonesia ini ideologinya adalah Pancasila. Sila pertama adalah Ketu-



nan Yang Maha Esa. Jadi, Gerindra dengan Pancasila dan PKNU yang religius Pancasila, sama saja. Ideologi Pancasila mencakup semua. Jadi tidak boleh diperdebatkan.

Bagaimana konkretnya dengan membentuk sayap Gerak Aswaja?

Organisasi sayap ini menggunakan jaringan dan organ PKNU yang sudah tertata mulai dari pusat hingga daerah. Dengan kesepakatan ini, organisasi sayap bentukan dua partai ini bisa memanfaatkan jaringan organisasi PKNU. Nanti gerakannya bisa sosial dan politik. Misinya rakyat lebih makmur, bermartabat, dan meningkat martabatnya. ◀



HUT KE-5 PARTAI GERINDRA

Songsong Perubahan Indonesia 2014

FOTO MUSTAFA KEMAL

Partai Gerindra berasal dari rakyat, berjuang sungguh-sungguh untuk rakyat Indonesia. Dan, rakyat Indonesia sekarang ini ingin mencari partai yang sungguh-sungguh, partai yang bersih.

OLEH BUDI SUCAHYO

SLOGAN "Kalau Bukan Sekarang, Kapan Lagi, Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi" bergaung di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 Partai Gerindra. Dalam acara syukuran yang berlangsung sederhana di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Jl. Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu 6 Februari 2013, slogan itu menjadi spirit bagi para kader Partai Gerindra yang memenuhi tenda besar, tempat acara syukuran itu berlangsung, untuk melakukan perubahan.

"Saya sangat senang dengan motto yang diajarkan anak muda Gerindra. 'Kalau Bukan Sekarang, Kapan Lagi. Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi'. Itulah nafas perjuangan kita sekarang," kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam pidato politik pada syukuran hari ulang tahun Partai Gerindra itu. Motto itu menjadi penyemangat bagi kader-kader Partai Gerindra untuk melakukan perubahan.

Dengan slogan itu, Prabowo menegaskan bahwa Partai Gerindra sedang menyongsong perubahan Republik Indonesia tahun 2014. "Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi," ujar Prabowo mengulang slogan itu.

Berkaitan dengan hal itu, Partai Gerindra sedang mempersiapkan diri untuk unjuk gigi.

Menurut Prabowo, pada saat yang tepat nanti Partai Gerindra memang sudah harus muncul menunjukkan kekuatannya di depan rakyat. "Kita sedang mencari waktu untuk unjuk gigi. Sang Garuda harus tampak gagah dan berani. Kita sedang merencanakan waktunya. Biar bangsa Indonesia percaya bahwa Gerindra adalah harapan masa depan," janji Prabowo.

Dalam pidato politiknya, Prabowo mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah persoalan yang sudah berlangsung selama ribuan tahun, yaitu pertentangan dan pertarungan antara yang benar dan yang bathil. Persoalan bangsa Indonesia, katanya, adalah pertarungan antara kaum Kurawa dan kaum Pandawa. "Persoalan bangsa ini adalah pertarungan antara mereka yang ingin merampok kekayaan dan mereka yang setia kepada rakyat dan cita-cita bangsa Indonesia," tegas mantan Pangkostrad ini.

Karena itu, lanjut Prabowo, Partai Gerindra dari awal dirancang dan dibangun selama beberapa tahun untuk menjadi partai yang militan, bukan partai yang mengharapkan uang dan memperkaya diri sendiri. "Dulu kita dipandang sebelah mata. Sekarang kita mendapat momentum. Saya rasakan ada harapan ke Gerindra. Angin berhembus ke Gerindra," ujarnya.

Mantan Danjen Kopassus itu juga mengungkapkan bahwa pesan-pesan dan perjuangan Partai Gerindra sampai ke hati rakyat, karena Partai Gerindra mengandalkan kekuatan dari rakyat. Partai Gerindra berasal dari rakyat, berjuang sungguh-sungguh untuk rakyat Indonesia. Dan, rakyat Indonesia sekarang

ini ingin mencari partai yang sungguh-sungguh, partai yang bersih.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan agar Partai Gerindra waspada. Sebab, di tengah-tengah masyarakat masih ada kelompok yang ingin memperkaya diri dari jabatan politik. Karena itu, Partai Gerindra membuka proses pendaftaran calon legislatif (caleg) secara transparan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mencari putra-putri terbaik. "Kader yang berjuang dari awal tentu kita hormati. Tapi kita ingatkan kepada semua kader, Partai Gerindra bukanlah yayasan kesejahteraan sosial. Partai Gerindra adalah alat perjuangan. Ini bukan partai cari kursi," sebutnya.

Karena itu, jika ada kader Partai Gerindra di daerah-daerah mengira dan berharap bahwa partai ini menjadi kendaraan untuk karir, jabatan, dan kursi, maka akan kecewa. "Partai Gerindra harus militan. Partai ini berkembang dari bawah. Kader yang kuat akan maju, tapi yang tidak kuat akan tenggelam, menyerah atau minggir," katanya.

Prabowo menyampaikan pidato politik yang berlangsung selama hampir satu jam itu dengan semangat tinggi. Kader Gerindra yang hadir di ruangan pun terpukau, ikut tergerak bersemangat. Sering terdengar yel-yel Prabowo Presiden...Prabowo Presiden...Prabowo Presiden yang disuarakan secara serentak dari kader Gerindra.

Soekarno Muda

Sebelum Prabowo naik ke podium menyampaikan pidato politik, lebih dulu Ketua Dewan Pakar dan Ketua Dewan Penasihat Partai Gerindra memberi sepatah dua patah kata menyambut HUT Ke-5 Partai Gerindra. Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra, Burhanuddin Abdullah,

mengatakan, dalam usia yang masih sangat muda Partai Gerindra telah menarik perhatian. "Satu hal yang menarik, Partai Gerindra sudah menawarkan harapan bahwa masa depan Indonesia akan semakin baik," ujarnya.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengingatkan lima hal yang harus diperhatikan Partai Gerindra. Pertama, Partai Gerindra agar tetap menjaga keyakinan pada visinya. Dengan keyakinan pada visi itu maka para kader akan semakin militan. Tanpa keyakinan, tidak ada militansi. Kedua, setiap kader Partai Gerindra harus meningkatkan kualitas diri. Ketiga, setiap kader Partai Gerindra harus bekerja keras. "Jangan bergantung pada tokoh karena mereka adalah orang sibuk. Tetapi tetap ikuti dan hormati para tokoh itu," katanya.

Keempat, menjaga kohesi sosial dan moral. Kelima, harus meningkatkan VOICE—dalam bahasa Indonesia artinya suara—yang merupakan singkatan dari *Vision, Obsession, Integrity, Courage* (keberanian), dan *Endurance* (daya tahan). "Partai Gerindra mempunyai visi yang jelas. Obsesi Partai Gerindra adalah agar rakyat sejahtera. Tanpa integritas, visi dan obsesi itu tidak akan terwujud. Juga dibutuhkan keberanian untuk menghadapi semua halangan, dan perlu daya tahan karena perjalanan masih panjang," jelas Burhanuddin Abdullah.

Sementara itu Ketua Dewan Penasihat Mayjen (purn) Haryadi Dharmawan berharap, Partai Gerindra mampu meneruskan perjuangan para pendiri bangsa dan mampu memimpin bangsa. "Meski masih berusia muda, Partai Gerindra cukup bergairah dan memiliki semangat yang tinggi. Tetapi perjuangan memang belum selesai," katanya.

Melihat kondisi bangsa dan

negara belakangan ini yang cukup memprihatinkan, Haryadi Dharmawan meminta dalam setahun ke depan, Partai Gerindra lebih menguatkan langkah berjuang untuk rakyat, bukan mengorbankan rakyat.

Selain diisi pidato politik, dalam HUT Ke-5 Partai Gerindra, Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto juga mengundang Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Wakil Ketua Umum, Ketua Sayap Partai, dan dua orang tamu, yaitu Presidium ICMI Prof Dr Nanat Fatah Nasir dan Ketua ICMI Peduli, Ratu Ageng, untuk "urun rembug" menyampaikan pandangan. Mereka yang tampil menyampaikan "pidato singkat" antara lain Prof Dr Suhardi, Permadi SH, Letjen TNI (Purn) Suharto, Laksda (Purn) Mukhlis, Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon, Ahmad Muzani, Soemarjati Arjoso, Soegiono, Ratu Ageng, dan Nanat Fatah Nasir.

Dalam orasi singkatnya, Permadi mengatakan bahwa pada 2013 ini sudah waktunya bagi Partai Gerindra bangkit untuk menunjukkan diri. "Kamilah partai besar, partai yang akan mengusung perubahan. Sebelum 2014, Gerindra sudah terbentuk sebagai kekuatan yang maha dahsyat," kata Permadi yang dikenal sebagai paranormal ini.

Khusus terhadap Prabowo Subianto yang kini dijuluki "Soekarno Muda" oleh Permadi. "Dulu saya menjuluki Prabowo sebagai Soekarno kecil. Sekarang meningkat menjadi Soekarno Muda. Soekarno Muda harus betul-betul berjuang untuk rakyat, untuk Indonesia, anti neoliberalisme, anti kapitalisme. Prabowo sudah sampai pada tataran itu," katanya seraya berharap Prabowo memimpin rakyat Indonesia seperti dulu Soekarno Muda memimpin bangsa Indonesia. ◀

Revisi atas Undang-undang Pemilihan Presiden mulai dibahas. Parpol besar ngotot tidak akan menurunkan ambang batas presiden.

OLEH IMAN FIRDAUS

PRESIDENTIAL THRESHOLD

Itu Akal-akalan Parpol Besar



FOTO AMUSTARA KEMAL

RAPAT pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR, pertengahan Februari lalu, dengan agenda penentuan pembahasan revisi atas Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak dihadiri seluruh anggota. Namun masing-masing perwakilan fraksi, terutama dari fraksi partai besar, hadir. Untuk fraksi kecil hanya dihadiri oleh Martin Hutabarat dari Fraksi Partai Gerindra.

Seperti sudah diduga sebelumnya, perwakilan partai-partai besar tidak menginginkan adanya perubahan atas undang-undang tersebut. Mereka menganggap bahwa undang-undang yang ada sudah cukup representatif sehingga tidak perlu diadakan perubahan. Partai Demokrat, misalnya, tegas meminta agar tidak ada revisi atas undang-undang ini. "Kalau dibahas lagi butuh waktu dan tenaga. Dan banyak kepentingan di dalamnya," ujar Subyakto dari Fraksi Partai Demokrat. Itu berarti, ambang batas presiden (*Presidential Threshold*) tidak akan mengalami perubahan.

Dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan *Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang*

memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Partai Golkar juga menyampaikan pendapat senada. Nurul Arifin dari Golkar mempertanyakan, mengapa revisi atas Undang-undang ini kembali akan dibahas. Padahal, dalam rapat pleno Baleg pada Oktober 2012 telah disepakati akan dibahas pada April mendatang. Mengulur waktu pembahasan, tentu saja berisiko tidak akan tuntasnya revisi tersebut. Itu berarti, sama dengan tidak akan terjadi revisi. Dengan kata lain, ambang batas presiden akan berlaku seperti semula.

Karena itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa ambang batas presiden hanya kemauan partai-partai besar. "Ambang batas presiden hanyalah kemauan partai-partai besar di DPR. Sebab, UUD NRI Tahun 1945 tak menyebutkan ambang batas. Bahkan membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada setiap warga negara untuk mencalonkan diri," katanya saat diskusi "Revisi UU Pilpres: Prinsip Keadilan untuk Semua" di kompleks Parlemen, Kamis (31/1).

Menurut Martin yang ikut hadir dalam pembahasan di Baleg, revisi atas Undang-undang tentang pemilihan presiden mendesak untuk dituntaskan, karena RUU ini harus mengakomodasi keinginan masyarakat. "Sistem presidensial tidak cukup tanpa dukungan kepemimpinan yang kuat. RUU Pilpres harus mengakomodasi keinginan masyarakat yang menginginkan perubahan," katanya.

Martin memberi contoh kasus Pilkada DKI Jakarta. Beberapa partai besar menyodorkan calonnya masing-masing. Namun desakan adanya perubahan dari masyarakat, memungkinkan Partai Gerindra yang merupakan partai pendatang, untuk ikut mencalonkan putra terbaik bangsa. Hasilnya pun di luar dugaan banyak pihak, terpilihnya pasangan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama. Ini membuktikan bahwa ambang batas sebenarnya tidak perlu diperketat. Sebab bila diperketat, maka para calon pemimpin berkualitas tidak akan hadir, sebab terganjal ambang batas yang sebenarnya hanyalah permainan para politisi belaka.

Para pakar pun sepakat agar ambang batas diturunkan. Bahkan kalau perlu dinaikkan sekalian agar tidak ada yang bisa mencalonkan pasangan, dan dipaksa harus berkoalisi.

Pakar hukum tata negara yang juga mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie berpendapat, soal ambang batas sudah lama dibawa ke MK. Tapi MK memutuskan, ambang batas bukan persoalan konstitusi, tapi pilihan kebijakan politik. Namun, persoalan ini juga bisa menjadi persoalan konstitusi apabila menghalangi keanekaragaman pemilih dan calon. "Kalau ambang batas sampai 30% maka hanya akan ada dua calon," katanya. Dan hal itu sama dengan mematikan keberagaman para calon pemimpin.

Karena itu, Jimly menyarankan agar jangan mempersoalkan ambang batas, tapi jadwal pengajuan calon presiden. Menurut UU, calon presiden harus dicalonkan sebelum pemilu. Dengan cara ini, maka partai akan koalisi sebelum pemilu. "Jadi tidak ada bicara ambang batas," katanya. Setelah koalisi sebelum pemilu, tahap kedua hanyalah koalisi di pemerintahan. Hal ini pun akan mengurangi biaya politik. Sebab, dalam setiap tahap koalisi masing-masing ada harganya.

Di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, jarang ada pembahasan RUU Pemilu. Namun agar tidak menimbulkan perdebatan setiap lima tahun, sebaiknya ada unifikasi sistem kepemiluan seperti Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP). Sehingga tidak perlu setiap lima tahun diadakan perubahan.

Sementara pengamat politik Soegeng Sarjadi dari *Soegeng Sarjadi Syndicate* (SSS) menawarkan ambang batas presiden yang lebih tinggi, sampai 40%. Tujuannya agar tidak ada yang berani mencalonkan presiden dari satu partai, sehingga memaksa untuk terjadi koalisi. Dengan cara ini tidak ada yang mengaku paling besar. Sehingga akan tercipta koalisi sebelum pemilu. "Atau jangan ada ambang batas presiden, sekalian. Jadi, 10 partai politik berhak mencalonkan presiden dan wakilnya," kata Soegeng.

Kini, keputusan menentukan calon pemimpin Indonesia di masa depan sedang ditentukan oleh perdebatan di parlemen. Seluruh fraksi yang ada di DPR, tentu saja, memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Bila fraksi-fraksi ngotot tidak akan menurunkan ambang batas presiden, maka kita hanya akan disuguhi calon presiden antara dua sampai tiga pasang yang sudah kita kenal selama ini, yang berasal dari partai politik. Padahal, potensi pemimpin Indonesia untuk periode mendatang, bertebaran di seluruh Indonesia. Hanya politisi berpikiran pendek yang menutup peluang tersebut. ◀

Dalam perekonomian Pancasila, pengusaha dan buruh bukanlah pihak saling bermusuhan. Mereka harus bekerja sama dengan prinsip kekeluargaan.

OLEH AGUSTAMAN

KONSEP ekonomi yang menyejahterakan sekaligus berpihak kepada buruh atau pekerja, petani dan nelayan adalah konsep berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Sesuai Pasal 33 UUD Tahun 1945 berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan." Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di hadapan ribuan buruh dalam Seminar Internasional Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Gedung YTKI, Jakarta, Selasa (5/2).

Prabowo mengatakan, dalam hubungan industrial pada sistem ekonomi seperti yang diamanatkan UUD, buruh dan pengusaha bukanlah pihak yang harus berhadapan atau saling bermusuhan. Mereka harus bekerja sama dengan prinsip kekeluargaan. Apabila ada masalah dalam hubungan industrial harus dimusyawarahkan dengan semangat kekeluargaan.

Apabila ada perselisihan antara buruh dan pengusaha, mantan Pangkrostrad ini berpendapat, pemerintah harus aktif menginter-

SEMINAR BURUH

Prabowo: "... Tapi Hati Pancasila."

vensi dan mendamaikan dua pihak secara kekeluargaan. Pemerintah tidak boleh hanya bertindak seperti wasit atau regulator. Menurut Prabowo, pemerintah harus berani intervensi apabila diperlukan, karena perekonomian yang berpihak kepada rakyat tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Kebijakan pemerintah yang tidak "ikut campur" dalam penyelesaian sengketa, membuat banyak perusahaan bangkrut dan nasib buruh terbengkalai. Pemerintah seharusnya turun tangan dan jika perlu mengambil alih dan menjadi pelaku usaha demi menyelamatkan perusahaan dan buruh.

"Presiden Obama pernah melakukan kebijakan itu, dengan mengambil alih perusahaan mobil internasional General Motor yang saat itu kondisinya bangkrut. Salah satu pertimbangannya, jumlah buruh di perusahaan itu sangat banyak," jelasnya.

Sebaliknya, buruh juga tidak boleh memaksakan kehendak dengan melakukan tekanan-tekanan yang memberatkan pengusaha, sedangkan pengusaha harus memenuhi hak-hak dasar buruh.

"Bagi buruh, yang dibutuhkan adalah jaminan keamanan sosial. Dia butuh rumah sakit kalau sakit. Butuh sekolah untuk anaknya. Butuh angkutan untuk kerja," pa-



FOTO MUSTAFA KEMAL

par Prabowo.

Prabowo bercerita, setelah pensiun dari militer, ia beralih profesi menjadi pengusaha. Namun, dalam berbisnis ia tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD Tahun 1945. "Aku kapitalis, karena sistemnya memang kapitalis. Tapi hatiku Pancasila," katanya disambut tepuk tangan hadirin.

Sebagai pengusaha, dirinya juga pernah dihadapkan hal sulit. Bisnisnya yang menaungi lebih dari 2.000

karyawan terancam bangkrut. Ketika itu tak ada lembaga perbankan yang bersedia memberikan kredit demi memulihkan bisnis Prabowo. Pilihannya hanya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.000 karyawannya, atau tetap bangkit dengan segala risikonya. Namun justru dirinya tidak memPHK para karyawannya. Mereka diajak duduk bersama bersama manajemen untuk memecahkan masalah tersebut.

"Direksi perusahaan saya sudah menganjurkan agar perusahaan melakukan PHK. Saya jawab *No*, kita sudah 11 tahun untung, kita akan tunggu sampai harga naik kembali. Mereka (karyawan) harus kita jaga, mereka keluarga kita. Tapi, saya tanya dulu ke direksi berapa lama bisa bangkit. Dia bilang dua tahun. Lalu saya ambil keputusan untuk tetap mempertahankan karyawan," ujar Prabowo. ◀

Prabowo Ajak Cendekiawan Melawan Korupsi



KASUS korupsi dan inefisiensi anggaran di Indonesia sudah masuk pada stadium membahayakan dan mengancam kedaulatan bangsa. Bila tidak segera dilakukan perubahan kebijakan, Indonesia berada di ambang negara gagal. Rakyat yang tidak sejahtera dan minimnya anggaran keamanan akan memunculkan persoalan yang bisa berujung pada aksi huru hara dan tumbangnya sebuah rezim.

Dengan kekuatan kharisma dan pengaruh, cendekiawan bisa mengubah satu kebijakan di sebuah negara. Prabowo mengajak para cendekiawan untuk memerangi korupsi dan inefisiensi anggaran.

OLEH BUDI SUCAHYO

"Sejarah telah menunjukkan bahwa negara besar seperti Uni Soviet dan rezim penguasa yang kuat di Timur Tengah bisa tumbang. Tidak ada uang untuk tentara dan rakyat karena korupsi dan inefisiensi merajalela di tingkat elit," kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat menjadi pembicara dalam Dialog Nasional bertema "Kepemimpinan Nasional Menuju Penguatan Kedaulatan Bangsa" yang diselenggarakan oleh ICMI Jawa Barat, di Hotel Preanger, Bandung, pada Sabtu 2 Februari 2013.

Menurut Prabowo, selain kasus korupsi yang semakin parah, saat ini pemborosan dan inefisiensi anggaran di Indonesia juga sudah

sangat mengkhawatirkan. Dia mencontohkan pemborosan dalam pelaksanaan Pemilukada di salah satu provinsi. Pemenang Pemilukada bisa menghabiskan dana Rp 600 miliar. Sementara calon yang kalah telah mengeluarkan dana sekitar Rp 400 miliar. "Jumlahnya sudah satu triliun. Dana darimana itu? Pasti dari anggaran. Itu baru provinsi, belum kabupaten dan kota," ujarnya dalam dialog yang dihadiri Ketua ICMI Jabar, Prof. Dr. H. Mohammad Najib bersama Ketua ICMI Pusat, Prof. Dr. H. Nanat Fatah Nasir dan Calon Wakil Gubernur Lex Laksmamana.

Di hadapan ratusan anggota ICMI Jawa Barat, Prabowo mengungkapkan informasi dari Wa-

kil Gubernur DKI Jakarta terkait dugaan kasus korupsi anggaran yang terjadi dalam APBD DKI Jakarta periode lalu. Masih wajar bila penggunaan anggaran pembelian barang mengambil keuntungan 10% - 20%. Tapi, jika sudah sampai ratusan bahkan ribuan persen maka sudah sangat membahayakan.

Prabowo menyebutkan, adanya anggaran *scanner* seharga Rp 2 juta, tetapi dianggarkan Rp 200 juta, biaya pembangunan halte bus sampai Rp 24 miliar, dan motor pemadam kebakaran seharga Rp 26 juta tetapi dianggarkan Rp 260 juta. "10 - 20% itu wajar dalam dagang. Tapi ini ratusan persen di DKI, sudah keterlaluan," kata Prabowo yang juga Dewan Penasihat ICMI Pusat.

Penggunaan anggaran nasional akan semakin tidak efisien karena adanya rencana penambahan empat provinsi dan 16 kabupaten baru di Indonesia. Dengan penambahan itu, anggaran daerah bisa habis untuk belanja pegawai, rumah dinas, gedung DPRD, dan banyak lagi fasilitas pemerintahan lainnya. "Perlu dipertimbangkan ulang kelanjutan pemilihan langsung kepala daerah dan pemekaran wilayah. Itu tidak

efisien," ujarnya.

Karena itu, Prabowo mengajak cendekiawan, profesor, dan guru besar di seluruh Indonesia yang tergabung dalam ICMI, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) untuk ikut dalam memberantas korupsi dan inefisiensi anggaran. "Saya mengajak para cendekiawan untuk bersama-sama melawan korupsi," katanya.

Menurut Prabowo, sejarah dunia telah membuktikan kekuatan kharisma dan pengaruh para cendekiawan bisa mengubah satu kebijakan di sebuah negara. Pemerintah Amerika Serikat sudah berulang kali merasakan dahsyatnya penolakan guru besar terkait kebijakan perang, salah satunya Perang Vietnam. "Kalau yang bicara itu aktivis, politisi, atau pengamat, pemerintah belum bergetar. Tetapi jika para guru besar sudah bersuara, di situ ada perubahan," kata mantan Danjen Kopasus ini.

Prabowo mengharapkan para guru besar memberikan kontribusi untuk membangun bangsa. "Otak dan hati nurani bangsa adalah guru besar. Mereka memimpin perubahan," ucapnya. ◀

Rachmat Pambudy

Impor Boleh, Asal...?

TERHITUNG sejak Januari 2013, pemerintah resmi melarang impor atas 13 produk hortikultura. Kebijakan ini diambil dengan harapan bisa menaikkan kesejahteraan petani dengan cara menjauhkan komoditas yang menjadi kompetitor dan meningkatkan potensi penjualan lebih besar bagi produk petani dalam negeri. Terlebih saat sekarang, dimana petani menghadapi masa panen. Ke-13 komoditas yang dilarang itu adalah kentang, kubis, wortel, cabai, nanas, melon, pisang, mangga, papaya, durian, bunga krisan, bunga anggrek, dan bunga heliconia.

Pelarangan impor dilakukan berdasar penghentian pemberian rekomendasi Kementerian Pertanian. Atau tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/2012 tentang Rekomendasi Impor Hortikultura, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Kedua ketentuan tersebut diterbitkan karena tingginya lonjakan impor hortikultura selama beberapa tahun terakhir.

Benarkah kebijakan penghentian impor hortikultura menjadi cara yang tepat untuk meningkatkan pendapatan petani? Ataukah ada cara lain yang harus ditempuh untuk meningkatkan taraf hidup para petani. Untuk menjawab pertanyaan tersebut **M. Budiono** dari *Gema Indonesia Raya* mewawancarai Dr. Ir. Rachmat Pambudy, MS., Wakil Ketua Umum DPN HKTI. Berikut petikannya:

Bagaimana Bapak melihat kondisi hortikultura kita saat ini?

Hortikultura itu terdiri dari buah, sayur, dan tanaman hias. Untuk beberapa jenis hortikultura tertentu, misalnya kangkung,

kita memiliki bibit yang sangat bagus. Bahkan kangkung kita telah mendunia. Bibit kangkung Indonesia sudah diekspor ke China, Thailand, dan negara-negara Asia lainnya. Demikian juga paria dan melon. Kedua komoditas itu juga sudah diekspor, tapi dalam bentuk bibit.

Namun, di *on farm* kita masih banyak kalah, termasuk dalam produk akhir. Produk akhir untuk wortel dan kentang misalnya, kita kalah dibanding luar negeri, karena memang produk yang dihasilkan petani masih jelek. Jadi jangan hanya terkonsentrasi mengatasi masalah ekspor impor saja, tapi *on farm* juga harus diperbaiki. Intinya, sejauh ini memang ada kemajuan, tetapi ada tuntutan dan kebutuhan baru yang harus dipenuhi.

Pemerintah akhirnya melakukan penghentian sementara impor atas 13 komoditas hortikultura. Komentar Bapak?

Kebijakan itu bagus dan harus diapresiasi. Apalagi ke-13 komoditas itu bisa diproduksi oleh petani dalam negeri. Sehingga memang sudah seharusnya komoditas-komoditas yang sangat mudah diproduksi ini diatur kembali. Intinya, memang tidak gampang melaksanakan kebijakan impor, seperti yang ada selama ini.

Kalau alasan penghentian itu karena musim panen, berarti hanya akan berlaku sementara waktu. Pendapat Bapak?

Ya, kalau begitu dibuat saja musim panen terus. Melon misalnya. Itu kan salah satu jenis buah-buahan yang tidak mengenal musim. Jadi meski alasannya karena musim panen, itu tidak apa-apa dan baik-baik saja.

Hal yang patut diperhatikan dari

penghentian impor itu mestinya begini, konsep ekspor impor itu harus diubah. Jangan kebanyakan dan jangan sampai kurang. Karena kita hidup dalam suasana saling berdagang, jadi tidak usah khawatir soal ekspor impor itu. Cuma, jangan sampai impor itu membuat ketergantungan yang sangat amat tinggi. Misalnya, sampai mengganggu produksi dalam negeri. Sebenarnya itu yang patut dikhawatirkan.

Coba begini, mari menggunakan perbandingan yang adil. Begitu kita impor otomotif dalam jumlah besar akhirnya bangsa ini malah tidak bisa melahirkan mobil sendiri. Begitu kita impor sepeda motor, kita tidak bisa menghasilkan sepeda motor sendiri. Padahal, apa susahnya membuat sepeda motor dan mobil. Pesawat terbang saja bisa kita bikin, kenapa sepeda motor tidak bisa. Begitu logikanya.

Masalah itu juga bisa menimpa tanaman, sayur mayur, serta buah-buahan dan ternak. Kalau tidak diatur maka kemampuan produksi kita menjadi hilang. Jadi semua harus diatur, mestinya dengan memerhatikan letak geografis, memerhatikan iklim makro dan mikro, memerhatikan kemampuan petaninya, memerhatikan kemampuan konsumen.

Letak geografis kita, misalnya, adalah bukit. Iklim makro mikronya adalah hujan dan panas, sementara petaninya biasa menanam tanaman tropis, konsumennya juga senang buah-buahan tropis. Kalau benar begitu, ya itu saja yang tingkatkan dan itu saja yang didorong.

Karena kalau kita nekat menanam buah kiwi misalnya, kita akan kesulitan. Juga terhadap kurma, tanamannya bisa tumbuh tapi tidak keluar bunga. Jadi, kalau kurma

lebih baik impor. Demikian juga zaitun, baiknya impor saja.

Tapi sebaliknya, hasil-hasil tanaman para petani seperti salak, manggis, kedondong, harus bisa diekspor. Jadi jangan hanya sepihak, karena namanya juga perdagangan antar negara.

Penghentian impor dilakukan dengan alasan panen, di mana keuntungan petani dan pemerintah?

Pada masa panen produksi berlebih, kalau ditambahi produk impor, katakanlah buahnya berbeda, tapi kalau harga buah impor itu jauh lebih murah pasti akan dilirik konsumen. Sebaliknya, masyarakat juga enggan membeli sayur atau buah dari dalam negeri. Jadi, meskipun sama-sama buah, misalnya di sini panen mangga tapi begitu banyak apel masuk, pir masuk, anggur masuk dan harganya murah sekali, pasti akan membuat mangga kehilangan kemampuan untuk dibeli konsumen.

Bagi petani, pelarangan impor menyebabkan produknya dibeli dengan harga yang baik. Sementara pemerintah tugasnya kan mengatur, jadi tidak selalu harus berfikir untung untuk dirinya sendiri. Kalau petani sudah untung, pemerintah pun seharusnya merasa beruntung. Tidak perlu dirinya sendiri mendapat untung secara langsung. Karena kalau petani merugi, dia harus membantu petani.

Kenapa bukan bea masuknya saja yang dinaikkan, bukan menghentikan impor seperti sekarang sehingga negara juga diuntungkan?

Bisa saja itu dilakukan, tapi hari ini pemerintah memilih untuk menghentikan impor. Intinya, sekarang ini pemerintah tengah berusaha mengatur. Dalam upaya pengaturan itu sebenarnya ada dua cara. Pertama, menyangkut tariff dan non tariff. Tariff bisa dilakukan dengan menaikkan bea masuk dan itu sudah sering dilakukan pemerintah. Mengurangi bea masuk, supaya memudahkan aliran barang masuk karena berarti harganya menjadi lebih kompetitif. Menaikkan dan menurunkan bea masuk adalah satu instrumen.

Kedua, kebijakan non tariff. Misalnya bisa menyangkut alasan kesehatan, atau karena bisa mematenkan kepentingan petani kecil. Jadi, kalau petani kecil merasa dirugikan dan sampai mengancam kehidupannya maka pemerintah berhak melakukan pelarangan dalam rangka melindungi petaninya.

Sekarang ini pemerintah sudah mengambil keputusan. Dan, kalau tetap memasukkan barang impor berarti akan mengurangi pangsa produk petani. Sekalipun konsumen yang sanggup membeli akan terbatas, tetapi mereka akan tetap beli. Sebaliknya, jika tidak tersedia, maka mereka akan membeli produk petani, karena mereka perlu makan buah.

Jadi fungsinya bukan debitnya. Kalau tidak ada melon, mungkin petani bisa makan mangga, meskipun itu berbeda. Tetapi jika ketersediaan melon impor banyak dan murah, mungkin orang tidak mau beli dan makan mangga, beli melon saja.

Terkait keinginan Amerika yang akan melaporkan kebijakan pemerintah ini ke WTO, bagaimana Bapak melihatnya?

Ancaman itu kan biasa saja, dan itu kewajiban pemerintah untuk melakukan pembelaan. Makanya kita harus berlatih dan melatih diri. Masalah ini juga bagus menjadi sarana latihan, kesempatan bagi para perunding menunjukkan kemampuannya. Agar dikemudian hari kalau menghadapi tuntutan negara lain tidak kalah lagi. Seperti juga negara-negara lain yang biasa menuntut dan dituntut, dan para perunding mereka sudah siap. Jadi soal menuntut menuntut dalam dunia perdagangan itu biasa. ◀

FOTO: FOTO MUSTAFA KEMAL



SEJAK pagi pada Kamis (21/2) warga masyarakat berkerumun di Balai Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Selain wanita dan anak-anak, tidak sedikit juga orang tua usia lanjut berada dalam kerumunan warga tersebut. Sebagian di antaranya terlihat sakit, ada yang batuk-batuk dan ada pula kondisinya sangat lemah karena dimakan usia.

Masyarakat yang berkumpul di balai desa itu, selain warga Desa Piyak juga warga sekitarnya. Mereka adalah korban banjir akibat meluapnya sungai Bengawan Solo pada Sabtu (16/2). Warga Desa Piyak merupakan sebagian dari korban banjir yang menimpa Kabupaten Bojonegoro. Selain Piyak, banjir juga merendam 16 kecamatan dan 156 desa di Kabupaten Bojonegoro.

Selama tiga hari, banjir merendam rumah, pekarangan, dan sawah milik warga. Padahal padi yang ditanam di sawah sudah mulai menguning, dan tak lama lagi panen. Namun, apa boleh buat, bencana banjir membuat sebagian tanaman padi rusak. Warga juga mulai mengeluhkan munculnya berbagai jenis penyakit pasca bencana banjir, seperti batuk, gatal-gatal, atau pusing.

Nah, hari itu, kehadiran para warga korban banjir ini di balai Desa Piyak itu adalah mengikuti acara bakti sosial peduli banjir yang di selenggarakan Partai Gerindra. Bentuk kegia-

tannya, pengobatan gratis dan donor darah. Tampak hadir di tengah-tengah warga tersebut anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Ir. Soepriyatno.

Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bojonegoro -- yang ikut menyertai Soepriyatno dalam acara bakti sosial itu -- dalam sambutannya, meminta para korban banjir bersabar dalam menghadapi musibah. Banjir yang terjadi di Bojonegoro ini merupakan banjir kiriman, bukan semata-mata karena hujan di Bojonegoro.

Ke depan, Setyo Hartono selaku pemerintah Kabupaten Bojonegoro berjanji akan melakukan evaluasi sekaligus membangun sejumlah tanggul di sungai Bengawan Solo untuk menghindari terulangnya bencana banjir.

Sementara Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Soepriyatno mengajak segenap pengurus DPC Gerindra Bojonegoro bahu membahu dengan masyarakat setempat melakukan penanaman pohon. Terutama di wilayah sepanjang bantaran sungai Bengawan. Pohon berfungsi untuk mengurangi kerusakan akibat banjir dan menjaga agar tidak kekeringan di musim kemarau.

DPC GERINDRA KABUPATEN BOJONEGORO Baksos Peduli Banjir Bojonegoro

Dengan menanam pohon, kata Soepriyatno, berarti kita meninggalkan air kehidupan bagi anak cucu. "Jadi saudara-saudara mau menanam pohon apa?", tanya Soepriyatno kepada warga di sela-sela sambutannya, yang dijawab kompak oleh warga masyarakat, "menanam pohon mangga".



"Kalau begitu, kapan gerakan menanam pohon itu akan dilaksanakan, dan saya berjanji akan menyumbang seluruh bibit pohon mangga, seperti yang bapak dan ibu minta", kata Soepriyatno.

Pada kesempatan itu, Soepriyatno juga memberikan sumbangan 1000 paket obat-obatan, meliputi: obat batuk, pusing dan gatal-gatal, serta sejumlah makanan pengganti air susu ibu kepada anak balita.

Selanjutnya, Soepriyatno dan Setyo Hartono melihat dari dekat, dan bahkan turut melayani masyarakat yang terlihat saling rebutan untuk mendapat pelayanan pengobatan dari panitia. ◀ MBO

FOTO DOK. PP TIDAR



PP. TIDAR TIDAR Gelar Rakernas II

SUHU politik di tahun 2013 kian memanas. Semua partai politik dan organisasi sayapnya kian serius mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2014, tak terkecuali Tunas Indonesia Raya (TIDAR). Organisasi sayap Partai Gerindra ini, selama tiga hari, Jumat hingga Minggu (1-3 Februari) melangsungkan Rakesnas II Pengurus Pusat TIDAR di Sekretariat DPP Partai Gerindra, Jl. RM. Harsono, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Rekernas bertema: "Bertindak Nyata Mendukung Pemimpin Baru, Haluan Baru, Menuju Indonesia Raya" itu diikuti perwakilan 24 Pengurus Daerah (PD) TIDAR se-Indonesia ini dibuka oleh Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Dalam sambutannya, Ahmad Muzani mengingatkan seluruh jajaran pengurus TIDAR agar terus meningkatkan kerja-kerja politik menghadapi pemilu 2014. Peningkatan kerja politik itu, menurut Muzani, penting karena ekspektasi masyarakat terhadap Partai Gerindra semakin besar.

"Jangan sampai dukungan dan kepercayaan yang saat ini diberikan masyarakat kepada Partai Gerindra tidak bisa berbuah menjadi kemenangan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai Presiden. Karena itu, kita harus bekerja lebih

keras lagi," pinta Muzani.

Partai Gerindra, kata Muzani, tidak akan bisa memenangkan pemilu jika harus berjuang sendirian. Demikian pula, keinginan menjadikan Prabowo sebagai Presiden pada 2014 tidak akan berhasil jika tidak didukung generasi muda, terutama TIDAR. Sebaliknya, Gerindra dan Prabowo bukan mustahil akan keluar sebagai pemenang jika seluruh generasi muda turut berjuang untuk memenangkannya.

Sementara Ketua PP TIDAR Aryo Djojohadikusumo mengingatkan kepada seluruh jajaran pengurus TIDAR agar tidak takut menjadi caleg, jika sudah mengantongi segala persyaratan yang dibutuhkan. Menurut Aryo, pilihan politik bergabung dengan Gerindra merupakan pilihan yang tepat. Karena dukungan masyarakat pada Gerindra semakin hari kian bertambah banyak.

Aryo berharap, keterlibatan TIDAR dalam kancah politik akan memicu generasi muda untuk lebih berperan aktif dalam perpolitikan. Sehingga mampu mengurangi jumlah generasi muda yang tidak peduli pada politik, dan mengurangi suara golput dari kalangan muda. ◀ MBO

DPC GERINDRA KOTA PADANG Peringatan HUT Gerindra ke-5 di Padang

PERAYAAN HUT ke-5 Partai Gerindra yang diselenggarakan DPC Kota Padang bertempat di Pantai Purus, Senin (11/2), berlangsung meriah. Berbagai atribut, mulai dari baliho hingga umbul-umbul berwarna merah putih berlambang Burung Garuda dengan nomor 6, terpasang di setiap sudut lokasi. Beberapa kegiatan juga dilangsungkan untuk menambah kemeriahan perayaan, yaitu: aksi bersih pantai, lomba tarik tambang dan *solo song*.

Diakhir lomba, kontingen PAC Gerindra Lubuk Kilangan keluar sebagai juara tarik tambang putra. Diikuti PAC Gerindra Padang Selatan dan Nanggalo, sebagai juara kedua dan ketiga. Sedang juara tarik tambang putri direbut kontingen PAC Nanggalo, disusul PAC Koto Tengah dan Padang Selatan.

Sementara untuk lomba *solo song* putri, juara pertama direbut kader PAC Gerindra Pauh, Mutia. Disusul Rani, kader PAC Gerindra Padang Barat sebagai juara dua, dan Ani Artaja dari DPC Gerindra Padang, juara tiga. Lalu, untuk *solo song* putra diraih Pink, kader PAC Gerindra Padang Timur, diikuti Reno, kader PAC Gerindra Lubuk Begalung, dan Ferdinand dari Satria Padang.

Dalam sambutannya, Ketua DPC Gerindra Kota Padang, H. Afrizal, SE, MBA., mengatakan, Partai Gerindra lahir untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu seluruh kader dan simpatisan partai harus berjuang bersama rakyat secara total. Karena itu, ia mengajak seluruh kader dan simpatisan untuk menyaringkan telinga, memanjangkan tangan, dan meringankan kaki untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi rakyat.

"Selaku pengurus, kader dan simpatisan Partai Gerindra, kita harus berkomitmen berjuang untuk rakyat," tandas Afrizal. ◀ MBO

PINDRA Istri Anggota DPR RI Tebar Paket Sembako

BENCANA banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Banten berhasil menyita perhatian dan simpati berbagai kalangan, tak terkecuali istri anggota DPR-RI dari Partai Gerindra (Pindra). Bersama PP. Perempuan Indonesia Raya (PIRA) dan DPC Gerindra Lebak, Pindra memberikan bantuan paket sembako kepada ratusan warga Kampung Bojong Cae Masjid, Kecamatan Cibadak Lebak, Banten.

Penyerahan bantuan berupa 500 paket sembako dilakukan secara langsung kepada para korban, pada Minggu (27/1), oleh ketua Pindra didampingi seluruh pengurus DPC Lebak, PAC kecamatan Cibadak, dan PR Desa Bojong Cae, disaksikan tokoh masyarakat dan kepala desa setempat.

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di berbagai daerah, menurut ketua PP Pindra Himmatul Aliyah, membuat pihaknya prihatin. Karena itu bersama seluruh pengurus dan anggota yang tergabung dalam Pindra memberikan bantuan kepada para warga yang menjadi korban. Bantuan itu tidak hanya ditujukan kepada warga Lebak, tapi juga kepada korban banjir di tempat lain, seperti di Tangerang, Serang, dan juga Jakarta.

"Bantuan yang kita berikan memang tidak seberapa nilainya. Paket sembako ini hanya bentuk kepedulian dan keprihatinan kami atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Semoga bantuan bermanfaat, sedikitnya mampu meringankan beban para warga," harap Himmatul. ◀ MBO

DPC GERINDRA LEBAK BANTEN Test Urine Buat Bacaleg

DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Lebak, Banten, bersiap menjegal bakal calon anggota legislatif yang secara positif didapatkan mengonsumsi narkoba. Penolakan tersebut berlaku bagi siapa saja, tanpa kecuali. Untuk itu, Gerindra akan memberlakukan tahapan tes urine untuk mengetahui kondisi bakal caleg.

"Di partai kita ada tahapan yang harus dilalui bakal caleg. Salah satunya pemeriksaan urine. Setiap bakal caleg wajib melampirkan hasil pemeriksaan tes urine narkoba. Jika hasilnya terbaca positif narkoba, maka bakal caleg itu tidak akan kita terima," kata Isbath Bachtar, anggota tim seleksi pendaftaran caleg DPC Gerindra Lebak.

Menurut Isbath, saat ini peredaran narko-

ba sudah dalam kondisi kronis. Banyak kalangan yang terpengaruh menggunakan barang haram yang dilarang oleh negara dan agama. Pemeriksaan urine kepada bakal caleg merupakan salah satu upaya Gerindra memerangi narkoba.

"Narkoba adalah musuh negara juga musuh agama. Partai Gerindra berusaha maksimal mensterilkan para calegnya melalui tahapan tes urine. Mudah-mudahan dengan benteng *save ours* yang kita lakukan ini, kedepannya, para legislator Gerindra benar-benar *cleans* dari narkoba," kata Isbath.

Untuk itu, Isbath mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun Lebak dengan ikut gabung di Partai Gerindra. Dan, berkompetisi dalam pemilu legislatif 2014 mendatang. ◀ MBO

DPD GERINDRA KALIMANTAN TIMUR Tawarkan Anggaran Desa Rp 1-5 miliar Setiap Desa



FOTO DOK. DPD GERINDRA KALIMANTAN TIMUR

SEJAK awal Februari silam di berbagai sudut jalan kota di Kalimantan Timur (Kaltim) tampak suasana yang lebih meriah dari biasanya. Ratusan baliho berukuran besar, rata-rata 5 x 10 meter, bergambar Partai Gerindra terpampang di berbagai tempat strategis di sana. Menarik, karena di tengah-lambang Partai Gerindra terdapat dua foto juga berukuran besar, yaitu foto Prabowo Subianto dan Ipong Muchlissoni, Ketua DPD Gerindra Kaltim.

Dan, yang lebih menggelitik lagi, dibaliko itu terdapat yang berisi tawaran dari Partai Gerindra berupa program percepatan pembangunan di Kaltim dengan alokasi anggaran Rp 1 - Rp 5 milyar per desa per tahun. Pemasangan baliho raksasa berikut pesan yang disampaikan itu erat kaitannya dengan Pemilihan Umum Kaltim yang dijadwalkan 10 September 2013.

Pesan lewat baliho ini, menurut Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, Ipong Muchlissoni, merupakan ikhtiar Gerindra dalam memperbaiki dan mengangkat taraf kesejahteraan rakyat. "Ini kami lakukan, karena Gerindra tidak mau terjebak dalam praktik perdagangan partai. Kami tak ingin partai dibeli oleh orang berduit yang ingin menjadi kepala daerah. Tapi, Gerindra hanya akan mendukung kandidat terbaik bagi rakyat Kaltim," katanya.

Calon gubernur (Cagub) dan wakil gubernur (Cawagub) yang akan diusung Gerindra adalah mereka yang bersedia dan mampu menjalankan konsep percepatan pembangu-

nan di Kaltim dengan pola pendekatan dari bawah, merata dan berkeadilan. Dengan bertumpu pada alokasi anggaran Rp 1-5 miliar tiap desa per tahun. "Itulah unsur pokok cagub/cawagub yang akan diusung Partai Gerindra," jelas Ipong.

Kalau ternyata kemudian Cagub/Cawagub yang memenuhi kriteria itu tidak memiliki cukup uang untuk maju dalam Pemilihan Umum Kaltim, kata Ipong, maka partai yang akan mencari sumber dana untuk keperluan kampanye dan sebagainya. "Jadi, saya jamin seratus persen sosok yang akan kami usung tidak akan mengeluarkan mahar politik secuilpun," tegas Ipong Muchlissoni.

Dengan program alokasi anggaran Rp 1 - Rp 5 miliar tiap desa per tahun tersebut diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menjerat Kaltim. Yaitu, kesenjangan antara wilayah pedalaman dan pantai. Serta infrastruktur dasar, seperti jalan yang layak, jaringan air bersih, yang kini masih menjadi barang langka di sebagian besar masyarakat desa.

"Ini merupakan terobosan dalam membangun Kaltim. Kalau hanya memakai pola konvensional, sampai kiamat jalan-jalan desa di kawasan pedalaman Kaltim tidak akan tersentuh pembangunan," kata Ipong lebih lanjut, "Pola ini sekaligus menjadi pendekatan kebijakan anggaran yang partisipatif. Biarlah masyarakat desa ikut mengelola kegiatan pembangunan secara aktif." ◀ MBO



FOTO DOK. DPD GERINDRA KOTA BEKASI

DPC GERINDRA KOTA BEKASI Gerindra Peduli Banjir Bekasi

UNTUK meringankan beban dan penderitaan korban banjir di Kota Bekasi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Bekasi menyalurkan bantuan kepada para korban di lingkungan RT 3/01 Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Acara tersebut dilaksanakan pada Selasa (5/2). Pada kesempatan itu DPC Gerindra Kota Bekasi menyerahkan bantuan berupa keperluan dan peralatan sekolah, sebanyak 200 paket. Terdiri dari buku, tas, pensil, dan seragam.

Menurut Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi Ibnu Hajar Tanjung, bantuan yang disalurkan itu berasal dari Cendy Dede Yusuf, istri calon Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf. Sebelum itu, kata Tanjung, DPC Kota Bekasi juga sudah menyalurkan bantuan sembako dan kebutuhan lainnya.

Tanjung mengatakan, bila dinilai secara material, bantuan yang diberikan Partai Ge-

rindra itu memang tidak seberapa. Namun, jika dinilai dari ketulusan dan keinginan untuk membangun silaturahmi, maka akan terlihat besar.

"Insya Allah, kita akan selalu peduli dengan memprioritaskan nasib warga. Kita akan memberikan bantuan secara tulus dan ikhlas. Kita berharap, bantuan yang diberikan bisa bermanfaat bagi warga, terutama korban banjir," kata Tanjung menambahkan.

Sementara itu, Ketua RT 03/01 Kelurahan Margajaya, Mian Rasyid mengaku gembira mendapatkan bantuan berupa peralatan sekolah untuk anak-anak warga sekitar. Pasalnya, bencana banjir yang melanda wilayah tersebut telah menghanyutkan seluruh perlengkapan sekolah. Saat terjadi musibah banjir awal Februari silam, wilayah RT 03/01 Kelurahan Margajaya merupakan daerah paling parah terkena dampak banjir. ◀ MBO

DPC GERINDRA GOWA Bagi Ribuan Gelas Susu

HARI Gizi dan Makanan Nasional pada 25 Januari 2013 diperingati

DPC Partai Gerindra Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan melakukan Gerakan Nasional Revolusi Putih. DPC Gerindra Kabupaten Gowa, dalam kesempatan itu membagikan ribuan gelas susu putih, di empat titik di Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, yaitu: Pandang-Pandang, Bonto-Bontoa, Bantangkaluku, dan Tamarunang.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari (29 - 31 Januari) itu dihadiri oleh Sulastriany Habie, anggota DPR RI dapil Sulawesi Selatan 1; Ketua DPC Partai Gerindra Gowa, Ir. Darmawangsyah Muin, MSi.; Anggota DPRD Gowa, Iryani Bakri; dan pengurus DPC dan PAC Sombaopu Gowa.

Menurut Anggota DPRD Gowa, Iryani Bakri, Gerakan Nasional Revolusi Putih yang dipusatkan di Kecamatan Sombaopu bertuju-

an menyadarkan masyarakat akan pentingnya susu bagi kesehatan. Terutama bagi anak Indonesia, khususnya di Kabupaten Gowa, agar menjadi anak yang sehat karena kebutuhan gizinya tercukupi.

Sementara Ketua DPC Gerindra Gowa, Ir. Darmawangsyah Muin, mengatakan bahwa Gerakan Revolusi Putih adalah program yang menyentuh langsung anak-anak. Ini penting, karena anak-anak inilah yang akan menjadi pemimpin dan penerus masa depan. Karena itu, sejak dini mereka harus selalu sehat, agar kelak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut Darmawangsyah, kegiatan ini akan dilaksanakan setiap bulan, dan lokasinya berganti-ganti. Selain kawasan pinggiran kota, DPC Gerindra Gowa juga akan mengelilingi daerah pedalaman, membagikan susu buat anak-anak. ◀ MBO



FOTO-FOTO MUSTAFA KEMAL

Produk Tas Manca TEMBUS MANCANEgara

Perjalanan nasib menjadikan Rahmansyah alias Manca menjadi produsen tas kamera yang terkenal sampai mancanegara.

OLEH AGUSTAMAN

BANJIR besar yang melanda Jakarta pada Januari 2013 berdampak besar buat jutaan warga Jakarta, tak terkecuali Rahmansyah. Selama beberapa hari, dia terpaksa menutup toko dan *workshop* Artrek-nya di kawasan Manggarai Utara, Jakarta Selatan, akibat banjir. Musibah banjir memang bukan pertama dialaminya. Tapi ketika aliran air sungai Ciliwung yang berada persis di belakang toko dan bengkel kerja Artrek meluap dan menggenangi tempat usahanya. Nah, itu artinya dia harus menghentikan sementara berproduksi.

Manca ini.

Sudah sejak 1997 pria yang mengaku hanya lulusan SLTA ini menjadi wirausahawan di sana. Makanya, ia tak punya niat untuk pindah lokasi usaha, meski ancaman banjir bisa datang setiap saat. "Ini rumah warisan orang tua saya. Saya dilahirkan dan dibesarkan di tempat ini. Di sinilah rezeki saya. Lagi pula, pelanggan lama tahunya saya di sini. Kalau pindah malah repot," terang Manca.

Ya, meski tempat usahanya berada di deretan bangunan rumah dan usaha semi permanen, tapi gaung

pernah mendatangi tempat usaha dan membeli produk Manca.

Padahal, pada 2002 ketika memulai bisnis tas kamera, merek Artrek dipandang sebelah mata. Manca sempat kesulitan ketika memperkenalkan tas kameranya ke toko-toko. Para pemilik toko lebih sering menolak tas buatan Manca.

Namun, berkat kegigihannya, perlahan-lahan Artrek mulai dikenal dan Manca pun tak kesulitan memasok produknya ke toko. "Itu juga berkat teman-teman fotografer yang menyebarkannya dari mulut ke mulut," ujar Manca yang kenal

harga jika dibandingkan dengan tas kamera impor. Selain itu, pengguna profesional juga merasa puas karena bisa mendapatkan tas kamera yang sesuai dengan desain yang diinginkan.

Dibantu 10 pekerja yang sebagian besar berasal dari Tasikmalaya, Artrek bisa memproduksi 200 *pieces* untuk semua *item* produk. *Item* produknya, mulai dari dompet gantung ID Card, tas kamera, tas video, sampai tas lampu. Produk tersebut kebanyakan pesanan dari perorangan dan perusahaan. "Kelompok *Trans Media* menjadi pelanggan tetap saya. Tapi saya juga produksi untuk stok di toko buat pembeli yang datang langsung," ucap pria kelahiran Jakarta, 8 Juli 1973, ini.

Modal Nekat

Manca mengatakan, apa yang diraihinya saat ini berawal dari kenekatan. "Ya, saya *khan* tadinya *nggak* bisa jahit. Tapi karena ada peluang di bisnis ini, mau tak mau belajar menjahit sendiri," terang suami dari Dyah Sivie Rispindini ini.

Manca bercerita, semasa SMA, dia sudah aktif di kegiatan pecinta alam dan menjadi sukarelawan di Gunung Gede, Jawa Barat. Setelah lulus SMA, Manca sempat mencoba bekerja di toko alat berat. "Cuma bertahan satu setengah tahun. Kemudian, saya menjadi karyawan di perusahaan ekspor impor selama tiga bulan," kata lelaki berkepala plontos ini.

Manca mengaku tidak betah bekerja ikut orang. "Ya, mungkin sudah terbiasa dengan kehidupan wiraswasta di keluarga, tidak bisa diatur orang," terangnya. Asal tahu saja, ayahnya memiliki usaha perkayuan.

Berbekal semangat itulah Manca memilih usaha pembuatan dompet, meski saat itu dia tidak bisa menjahit. Bermodal mesin jahit milik ibunya dan uang Rp 300.000 dari hasil menjual sepeda motor, ia me-

mulai usahanya. Dompet yang diproduksi diberi merek *Artrek*.

Bukan hanya dompet, Manca juga memproduksi tas *outdoor*. Ia membuat tas *outdoor*, lantaran banyak temannya di kalangan pecinta alam membutuhkannya. Ia menjual tas dan dompetnya produksinya secara *door to door*. "Awalnya yang membeli teman sendiri," katanya. Seiring dengan penambahan kapasitas produksi, ia pun merekrut karyawan yang kebanyakan penjahit asal Tasikmalaya.

Tahun 2000, persaingan bisnis tas *outdoor* semakin ketat. Manca memutar otak untuk menyelamatkan bisnisnya. Lalu, dia mencoba membuat tas kamera. "Tas kamera itu mahal karena rata-rata impor. Saya tertarik membuat tas berkualitas bagus dengan harga terjangkau," katanya.

Mengingat jaringan pertemanannya dengan fotografer di tanah air cukup bagus, penyuka fotografi ini pun memilih fokus memproduksi tas kamera pada 2002. "Saya ingin membangun merek. Kalau mau tas kamera, ya, Artrek. Tas jenis lain saya layani tapi hanya berdasarkan pesanan," jelas Manca yang membanderol harga produknya mulai dari Rp 50 ribu sampai Rp 350 ribu. Ayah dua anak ini mengaku omzetnya kini rata-rata Rp 10 juta per bulan.

Namun, bisnis tak selamanya mulus. Manca sempat terpuruk di 2003, saat harga bahan baku melonjak tinggi. "Saya berusaha bertahan terus. Caranya, dengan menerima order selain pembuatan tas kamera," katanya.

Ia juga pernah merasakan sakitnya dikhianati teman yang juga karyawannya. Sang teman membawa uang hasil order pembuatan tas. Tapi dengan berbesar hati, Manca tak memperkarakan temannya itu, dan tetap bertanggung jawab menyelesaikan order klien. "Rezeki ada yang mengatur," tutur lulusan SMA Wahid Hasyim Jombang, Jawa Timur, ini. ◀



Rahmansyah (Manca): kenekatannya berbuah manis

"Dibilang rugi sih tidak, cuma merepotkan. Produksi juga sedikit terhambat, dari seharusnya bisa satu hari jadi terpaksa diundur beberapa hari sampai banjir surut," kata pemilik produksi *photography, cinematography support* yang akrab disapa

toko tas kamera dan video merek Artrek milik Manca sudah menjangkau mancanegara. Buktinya, dua fotografer terkemuka dunia, John Stanmeyer (salah satu pendiri VII Photo Agency), dan James Nachtwey (fotografer perang ternama)

dengan sebagian besar fotografer media dan fotografer profesional lainnya di Jabodetabek, terutama mereka yang pernah memesan produk kepadanya.

Tas kamera buatan Manca menjadi laku karena kompetitif dari segi

Irwansyah

Tidak Ingin Korupsi

ARTIS menjadi calon anggota DPR bukan fenomena baru. Kali ini, **Irwansyah** didampingi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra **Fadli Zon** bertekad menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Banten. Formulir kesediaan sudah diisi dan telah dikembalikan pada pertengahan Februari lalu. Suami dari artis Zaskia Sunkar itu pun siap mengerahkan tenaga dan pikiran bagi kemengangan partai berlambang kepala burung Garuda itu. "Gerindra pantas untuk mengatur Indonesia. Pak Prabowo saya rasa pantas jadi presiden," katanya memberi alasan.

Apalagi Partai Gerindra terus berkembang sejak 2008. Karena itu, saat pendaftaran calon anggota legislatif dibuka, Irwansyah pun tak menyia-nyiaikan kesempatan. "Saya berminat untuk masuk ke Gerindra karena salah satu partai yang cukup besar," ujarnya. Keinginan untuk menjadi politisi Senayan juga bukan karena dorongan nafsu berkuasa apalagi mencari uang, tapi karena nuraninya. "Saya tidak ingin korupsi. Kalau investasinya gede, nanti balikin modalnya gede juga dong," akunya. Baginya, kehidupan sebagai politisi harus dijalani dengan normal saja.

Sebelum terjun ke partai politik, pemain sinetron ini pernah mencalonkan diri jadi Bupati Tangerang pada 2012. Tapi gagal. Dan, kali ini, mudah-mudahan berhasil. ◀ **IF**

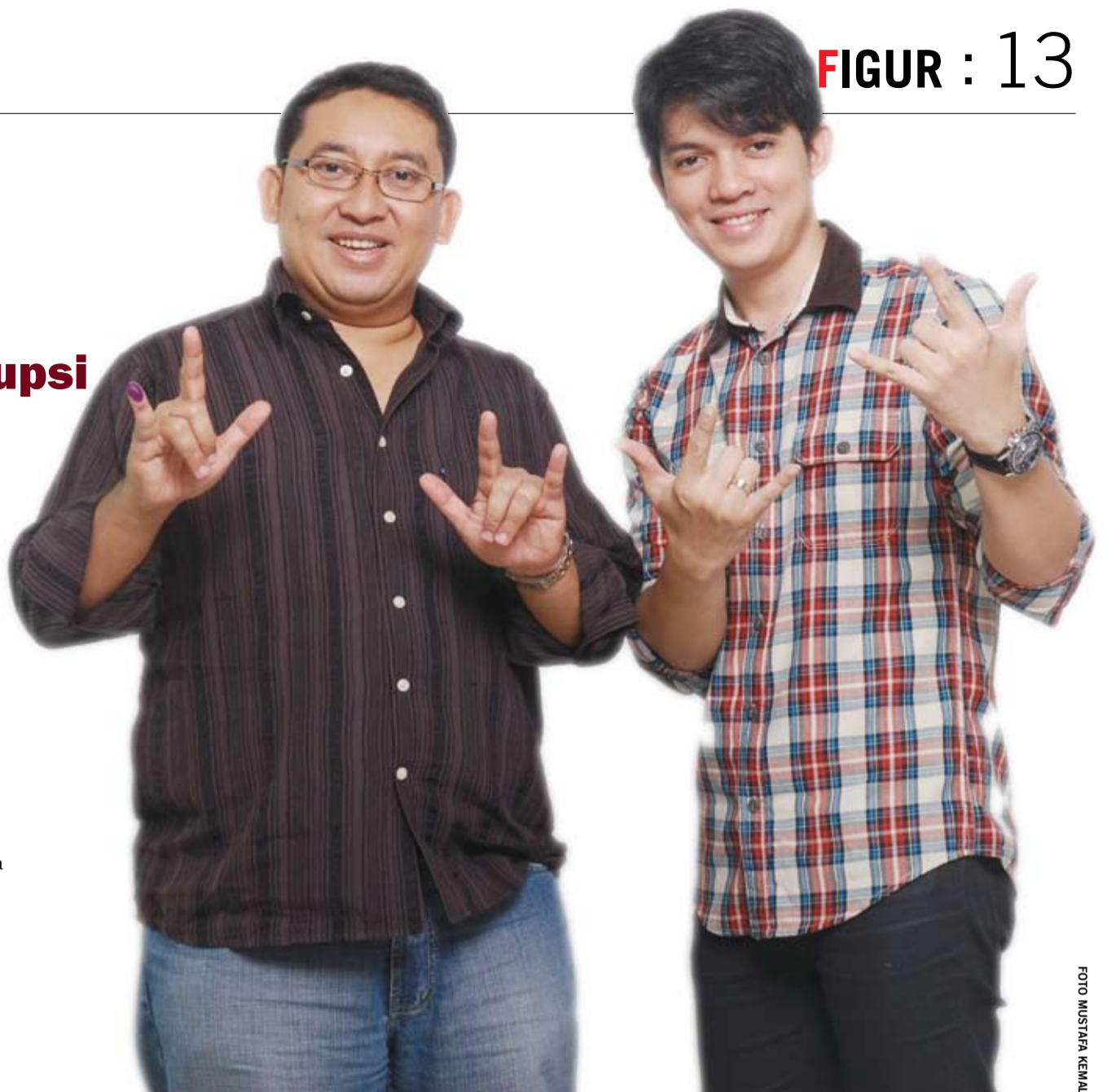


FOTO MUSTAFA KEMAL

FOTO ISTIMEWA



Kezia Elvina Wabiser

Politik Bukan Profesi

MENYANDANG profesi sebagai dokter di Papua Barat adalah kebangganya. Menjadi Puteri Persahabatan dalam kontes Puteri Indonesia 2013 adalah anugerah yang diterimanya. Tapi menjadi politisi adalah pengabdianya. "Politik bukan profesi tapi alat atau sarana pendukung profesi. Jadi saya rasa dari berbagai bidang keahlian dan profesi bisa menjadi sarana penyambung lidah ketika masuk di dalam dunia politik," kata **Kezia Elvina Wabiser**, Wakil Ketua DPD Gerindra Papua Barat. Melalui politik itu pula Kezia ingin menyumbang perubahan di daerahnya, seperti semangat Gerindra yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Karena itu, meski tergolong muda, Kezia mengaku bisa menjalankan tugas dan amanat yang diberikan kepadanya. "Saya yakin bila dengan hati yang tulus dan jujur, kesiapan saya yang belum seratus persen akan Tuhan restui," katanya. Apalagi di tanah Papua, Kezia merasa bisa turut andil mengadakan perubahan dengan berpihak kepada kepentingan rakyat. Sehingga pemerintah pusat bisa memandang masyarakat Papua dengan lebih terhormat. "Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi," katanya memberi umpama.

Sebagai dokter di Puskesmas Sorong, peraih Puteri Intelensia ini juga mengaku akan berjuang dalam bidang kesehatan. Karena kesehatan juga dinilai sebagai modal utama dalam pembangunan. "Tanpa kesehatan semua adalah sia-sia," katanya. ◀ **IF**

Nirmala Ratimanjari

Suka Karena Ditantang



FOTO DOK. PRIBADI

PADA setiap acara yang digelar dengan melibatkan Badan Komunikasi (Bakom) Partai Gerindra, perempuan berhidung mancung dan berambut tergerai sebau itu selalu hadir. Dialah **Nirmala Ratimanjari**, perempuan yang dipercaya memberikan analisis, strategi, dan rekomendasi kepada Bakom. Selain urusan yang berkaitan dengan komunikasi partai tersebut, ia juga punya tanggungjawab melakukan koordinasi dengan berbagai unsur lain di partai, seperti dengan DPP, fraksi, dan sejumlah sayap partai.

"Sejak bergabung di Bakom pada 2010, masih belum banyak koordinasi dengan klaster-klaster lain di partai. Tapi sejak diselenggarakannya rapat koordinasi itu, sudah semakin terang," katanya sambil menyebut rapat koordinasi yang dilakukan oleh Bakom pertengahan Januari lalu. Rapat itu menghadirkan sejumlah DPD dan fraksi, dibuka langsung oleh Wakil Ketua Bakom Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Pada kesempatan tersebut Nirmala kebagian tugas menjadi moderator di salah satu sesi diskusi bersama Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Meski hanya menjadi moderator, Nirmala pun berkesempatan memaparkan pengalamannya dalam memantau perkembangan media dan menangani sejumlah isu. "Saya suka karena ditantang mencari strategi yang tepat untuk memajukan Gerindra. Dan juga berhubungan dengan orang-orang yang berbeda kultur dan cara kerja," ujarnya.

Tak pelak, setiap Bakom mengadakan acara di manapun, Nirmala berusaha hadir. Termasuk saat mengadakan acara pemberian akta kelahiran bagi warga masyarakat keturunan Tionghoa di Tangerang, Banten, yang dikenal dengan sebutan Cina Benteng, beberapa waktu lalu. ◀ **IF**

Ancaman Keamanan Nasional Makin Kompleks



Tragedi bom Hotel JW Marriot Jakarta, 2009

FOTO ISTIMEWA

ARUS globalisasi yang melanda dunia, termasuk Indonesia, memiliki nilai positif dan negatif. Salah satu sisi negatif adalah hadirnya berbagai ancaman yang kompleks dan multidimensi, yang mengganggu keamanan nasional seperti terorisme, narkoba, serta virus yang mengancam nyawa. Hal tersebut dapat merongrong kepentingan nasional.

Berbagai negara dapat menggunakan segala macam cara demi kepentingan negaranya atau golongan. Karena itu, melindungi negara dari berbagai ancaman harus menjadi perhatian seluruh warga. Apalagi para pendiri bangsa sudah mengamanatkan, untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" seperti tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea 4.

Fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa tugas dan fungsi negara adalah melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara, termasuk aktivitas terorisme. "Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme secara memadai dan komprehensif. Maka undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme perlu dibuat," kata anggota Pansus Rindoko Dahono Wingit.

Karena itu, Fraksi Partai Gerindra setuju dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme disahkan menjadi

Undang-undang (UU) bersama pemerintah, dalam rapat paripurna Selasa (12/02). Namun UU ini harus diarahkan dan memiliki semangat bukan untuk memotong hak asasi manusia, tapi untuk menegakkan supremasi hukum terhadap terorisme.

Untuk menjaga agar pelaksanaan aturan itu adil, maka UU ini akan mencantumkan: *Pertama*, pengaturan yang jelas mengenai penentuan dan penetapan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pendanaan terorisme. *Kedua*, pemberian sanksi pidana dan administrasi yang tegas dan dapat benar-benar memberikan efek jera. Dan, *ketiga*, keberhasilan UU ini memerlukan kerjasama yang baik dari semua instansi terkait dan juga hubungan baik dengan negara lain. ◀ IF

RUU Perdagangan Sangat Liberal

RANCANGAN Undang-undang (RUU) Perdagangan yang kini sedang dibahas oleh Komisi VI dinilai sarat kepentingan asing dan mengedepankan ekonomi liberal. Hal itu dikemukakan oleh pengamat ekonomi Revrison Baswir dan Hendri Saparini serta mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah.

Ekonom Revrison Baswir meminta agar pembahasan RUU Perdagangan dihentikan. Alasannya, naskah akademiknya sudah bermasalah, yakni memperlihatkan kecenderungan yang liberal. "Dalam naskah akademik disebutkan pemerintah berada di luar mekanisme pasar," katanya dalam diskusi publik Fraksi Partai Gerindra dengan tema "Kajian RUU tentang Perdagangan" di Kompleks Parlemen, Jumat (8/2).

Bahkan, kata Revrison, sangat jelas semangat dari RUU ini menginginkan agar perdagangan tidak dibuat regulasi. Jadi, jual beli tanah, jual beli air, jual beli pulau tidak

diatur. Karena itu, lanjutnya, sebelum membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebaiknya naskah akademiknya diperbaiki.

Sementara anggota Komisi VI dari FP Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, naskah akademik memang sering hanya sekadar formalitas. Apalagi RUU usul pemerintah ini selalu tertunda pembahasannya. Sampai saat ini, kata Edhy, Indonesia belum memiliki UU Perdagangan. Produk hukum setara undang-undang masih mengacu pada hukum kolonial Belanda BRO 1934 yang lebih banyak mengatur tentang perizinan usaha. Sedangkan produk hukum lainnya diatur secara terpisah.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani memandang RUU Perdagangan ini belum memberikan kepastian hukum terkait aspek yang sangat mendasar, yaitu keberadaan faktor-faktor produksi yang penting bagi negara dan memengaruhi hajat hidup orang banyak dalam kaitannya dengan perdagang-

an. Kemudian pengaturan hubungan dagang yang disinergikan dengan kebutuhan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjaga stabilitas perekonomian nasional.

"Dalam hal kerja sama dagang, khususnya terkait kerja sama dagang regional dan internasional, belum menunjukkan adanya ketegasan dalam melindungi kepentingan nasional kita," katanya. Menurut Muzani, RUU Perdagangan ini seharusnya memberikan penguatan dan kepastian hukum di bidang perdagangan.

RUU Perdagangan ini sudah cukup lama diminta untuk dibahas oleh Komisi VI. Salah satu alasan lamanya pembahasan RUU Perdagangan ini adalah belum tuntasnya sinkronisasi antarkementerian. RUU ini merupakan usul dari pemerintah, namun naskah dan draftnya selalu terhambat. "Sejak pertama kali duduk di DPR, RUU ini langsung kita minta," katanya. ◀ IF

Kasus Proyek Vaksin Flu Burung Menguap

BADAN Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) telah melaporkan hasil telaah atas dugaan kerugian negara terhadap proyek vaksin Flu Burung. Menurut Ketua BAKN Sumarjati Arjoso (Fraksi Partai Gerindra), berdasarkan telaah BAKN terhadap hasil audit BPK, potensi kerugian negara dalam kasus proyek flu burung terbilang besar. Bahkan angkanya lebih besar daripada kasus Hambalang, Rp 468,98 miliar.

Sebelumnya BAKN menggulirkan hasil telaahnya agar ditindaklanjuti Komisi IX DPR. Setelah sempat membuat Panja Flu Burung, kasus ini justru menguap begitu saja di komisi tersebut. "Sepertinya Panja tidak jalan dan tidak jelas tindak lanjutnya. Sampai dengan BAKN menerima surat dari masyarakat yang mengeluhkan tidak bekerjanya alat kelengkapan di DPR yang menangani kasus ini," kata Sumarjati.

Kasus ini sudah ditangani KPK dan kepolisian. KPK menyelidiki proyek vaksin flu burung tahun anggaran 2011. Sedangkan kepolisian menyelidik proyek itu untuk tahun anggaran sebelumnya, 2008 hingga 2010. KPK menyelidiki pengadaan pabrik vaksin flu burung senilai Rp 1,3 triliun yang dibangun di kawasan Pasteur, Bandung, Jawa Barat. Dalam penyelidikannya, KPK menemukan dugaan keterlibatan M. Nazaruddin saat menjabat bendahara umum Partai Demokrat.

Selama di bawah kepemimpinan Sumarjati, BAKN telah membuat beberapa gebrakan. Selain menelaah dugaan penyelewengan negara terhadap vaksin Flu Burung, juga menelaah kasus Proyek Hambalang dan juga dugaan penyelewengan proyek laboratorium di sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia. ◀ IF

Pelayanan Haji Perlu Dibenahi

PELAYANAN terhadap calon jemaah haji setiap tahun belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Selalu saja ditemukan keluhan dan berbagai penyelewengan sehingga merugikan jemaah haji asal Indonesia. Anggot Fraksi Gerindra yang duduk di Komisi VIII (yang membidangi masalah agama, haji, dan kesejahteraan rakyat) Sumarjati Arjoso dan Noura Dian Hartarony meminta dengan serius kepada Kementerian Agama untuk membenahi semuanya. "Saat ini banyak pelayan haji yang tidak mau berangkat untuk melayani jemaah," kata Sumarjati memberi contoh.

Sementara soal rencana Kementerian Agama yang akan memberangkatkan kloter khusus lansia (lanjut usia), Fraksi Partai Gerindra meminta agar dilakukan hati-hati. Sebab, banyak juga jemaah haji lansia yang sakit dan akhirnya meninggal. Karena itu, walaupun lansia tetap harus sehat.

Sedangkan Noura mengusulkan agar ada rekening haji buat remaja. Hal ini untuk mendorong agar ada kesadaran haji sejak remaja dan mempersiapkannya sejak awal. Dengan begitu persoalan penumpukan jemaah haji akan teratasi. ◀ IF

profil

Ipong Muchlissoni

Loyalis Gus Dur Pimpin Gerindra Kaltim

Berniat pensiun dari politik setelah PKB Gus Dur tak diakui oleh negara, Ipong akhirnya luluh kembali menerima tantangan memimpin Gerindra Kaltim.

OLEH AGUSTAMAN DAN
M. BUDIONO

PERFORMA seorang Drs. H. Ipong Muchlissoni sebagai orang pengusaha dan politisi memang tak diragukan lagi. Ia pernah menjabat Ketua DPW PKB Kalimantan Timur (Kaltim), yang kemudian mengantarkan Ipong menjadi wakil rakyat di DPRD Kaltim selama dua periode. Dia juga pernah mencalonkan diri menjadi Wali Kota Samarinda pada 2010, meski kalah suara dari *incumbent* yang terpilih kembali memegang jabatan itu.

Setelah gagal dalam pemilihan Wali Kota Samarinda itulah Ipong seperti “menghilang” dari hingar-bingar politik di Benua Etam itu. Sampai kemudian, publik Kaltim dikejutkan dengan berita yang datang dari markas Partai Gerindra di Jakarta bahwa mulai 29 Agustus 2012 Ipong didaulat menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim menggantikan ketua sebelumnya.

Tentu para petinggi Partai Gerindra di Jakarta tak sembarangan menunjuk mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dikenal sebagai loyalis Gus Dur itu sebagai nakhoda baru Gerindra Kaltim. Apalagi, Ipong juga bukan sosok politisi “kemarin sore”.

Jejak politik pria kelahiran Lamongan, Jawa Timur, 29 April 1967, ini bermula ketika dia bergabung sebagai anggota PKB Kal-

tim pasca turunnya Presiden Soeharto, 1998. Ada beberapa alasan mengapa dia memilih menjadi politisi dan bergabung ke partai bentukan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur). *Pertama*, Ipong ingin mencoba tantangan baru, sekaligus menyalurkan minat politik yang terbentuk di dalam keluarga besarnya (ayahnya politisi Partai Persatuan Pembangunan di Ponorogo, Jatim) serta pendidikan formalnya di jurusan ilmu politik Universitas Mulawarman, Samarinda.

Kedua, bisnis pertamanya di bidang jasa *advertising* luar ruang sudah berjalan dan dikelola dengan baik oleh tenaga profesional. Jadi Ipong punya waktu cukup untuk berkiprah di politik praktis.

Ketiga, sudah lama mantan Kasi Adm/SDM PT KPI (Kiani Group) ini mengidolakan Gus Dur yang dinilai konsisten berani mengkritik kekuasaan sejak zaman Presiden Soeharto berkuasa. Maka, ketika idolanya yang mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PB NU) ini mendirikan PKB, Ipong pun melamar menjadi anggota partai.

Dalam perjalanan politiknya di PKB, suami dari Sri Wahyuni, S.Sos., ini ternyata tak sekedar menjadi anggota biasa. Dia memegang jabatan, mulai dari pos wakil ketua sampai Sekretaris DPW (Dewan Perwakilan Wilayah). Bersama pengurus lainnya, Ipong bahu-membahu membentuk organ partai sampai menjelang pemilu 1999. Walhasil, mantan wakil ketua senat Fisip Unmul ini terpilih menjadi anggota DPRD Kaltim pada pemilu 1999. Setelah lima tahun menjadi wakil rakyat di Bumi Etam, menjelang pemilu 2004, Ipong yang saat itu didapuk menjadi Ketua DPW PKB Kaltim terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kaltim.

Bergabung ke Gerindra

Sayangnya, karir politik Ipong harus dipaksa berakhir ketika partai gagasan Gus Dur tersebut mengalami kekisruhan. Kepengurusan PKB yang dianggap sehaluan dengan Gus Dur dinyatakan ilegal oleh pemerintah. Sebagai Ketua DPW PKB dia tidak diakui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). DPW Kaltim yang dipimpinya diberi kesempatan untuk bisa ikut pemilu asal bergabung dengan PKB faksi lain yang diakui pemerintah, dengan syarat meninggalkan jalur Gus Dur. Ipong bergeming karena alasan nurani dan historis.

Sejak itu Ipong berpikir pensiun dari hingar-bingar politik dan bergelut kembali di bisnis properti yang ia bangun sejak sepuluh tahun sebelumnya. Bisnis pembangunan hunian ini sudah berkembang dan memberikan penghasilan yang lebih dari cukup.

Namun, godaan politik datang dari teman-temannya, termasuk parpol. Ia pun diusung menjadi calon Wali Kota Samarinda 2010 oleh tiga parpol. Sayangnya, mantan Ketua Harian Pengda Perbasi Kaltim ini hanya meraih suara urutan kedua terbanyak setelah *incumbent*.

Dari pengalaman ikut *Pemilukada* tadi, ia mengaku banyak mendapat pelajaran politik. Terutama menyangkut aspek bagaimana membangun jejaring politik dan membangun komunikasi politik guna memikat masyarakat pemilih.

“Tapi semuanya harus saya simpan dalam hati, karena saya tak berpartai lagi,” kisah Ipong yang setelah *Pemilukada* Samarinda 2010 memutuskan istirahat dari dunia politik dan kembali menekuni bisnis propertinya, seperti mengembangkan usaha kompleks pasar

rakyat di Palaran, membangun sejumlah hunian baru di Samarinda dan sekitarnya. “Karena sudah dijalankan oleh profesional, saya justru seperti pengangguran. Dalam kondisi seperti itu, kerinduan kembali ke dunia politik tak bisa hilang,” sambung ayah tiga anak ini.

Pucuk dicinta ulam tiba. Keinginannya kembali ke panggung politik praktis akhirnya terbuka setelah beberapa waktu lalu dia didatangi tim bentukan DPP Gerindra. Tim itu menyampaikan niatnya mencalonkan Ipong menjadi ketua DPD Gerindra Kaltim. Maklum, kondisi dan kepengurusan Gerindra di Kaltim nyaris tak terdengar kiprahnya di publik.

Singkat cerita, setelah dia bersedia bergabung ke Gerindra dan melakukan “fit & proper test” di hadapan tim penilai di Gerindra pusat, Ipong akhirnya mau menerima tantangan menjadi Ketua DPW Gerindra Kaltim.

Ipong merasa pas di partai berlambang Kepala Burung Garuda ini, dengan alasan menemukan simbol yang menyerupai sosok Gus Dur di diri Ketua Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Nilai-nilai, sikap dan semangat yang dikembangkan mantan Pangkostrad, seperti platform penguatan kedaulatan nasional, kedaulatan ekonomi, konsep kemandirian bangsa, pro-pruralisme, kekuatan wawasan NKRI-nya dan sikap politiknya yang tidak terlalu kompromistis dengan penguasa atau kekuasaan, dianggap mirip Gus Dur.

“Saya juga ingat, sebelum Gus Dur wafat, beliau pernah berpesan, sekiranya keluar dari PKB, bergabunglah dengan partainya Prabowo, Gerindra,” ucap Ipong Muchlissoni.

Kini, di bawah komando pria yang digadang-gadang menjadi calon Gubernur Kaltim untuk periode mendatang, kebangkitan Gerindra di Kaltim dimulai. Selamat berjuang bersama Gerindra. ◀

FOTO MUSTAFA KEMAL



6



**GERINDRA MENANG
PRABOWO PRESIDEN**